BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

# LAPORAN
# PELAKSANAAN KEGIATAN
## PENGADILAN NEGERI KENDARI
## TAHUN 2025




PN KENDARI Melayani dengan
**P**rofesional, **A**kuntabel, **S**epenuh Hati
**T**ransparan, **I**ntegritas

JL. MAYJEN SUTOYO NO.37 KENDARI SULAWESI TENGGARA
TLP. 0401-3121714, EMAIL : PEEN.KENDARI@YAHOO.COM

pn.kendari | Pengadilan Negeri Kendari | Pengadilan Negeri Kendari | www.pn-kendari.go.id

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia- Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Kendari dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung tepat waktu. Penyusunan Laporan ini berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 untuk Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025. Laporan ini menggambarkan situasi dan kondisi serta perkembangan Pengadilan Negeri Kendari selama Tahun 2025, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Laporan ini menjadi pelengkap bahan penyusunan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bahan evaluasi untuk penyusunan program kerja selanjutnya. Besar harapan kami untuk terwujudnya progesivitas pelayanan di Bidang Teknis dan Non Teknis dari tahun ke tahun dengan berpedoman pada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu 'Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung' serta meyakini kapabilitas kinerja yang sesuai dengan ekspetasi rencana kerja.

Demikian, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Kendari dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Kendari dan bermanfaaat bagi masyarakat.

Kendari, 15 Januari 2026
**Ketua Pengadilan Negeri Kendari**

PENGADILAN NEGERI KENDARI

**RUSTAM**

## DAFTAR ISI

PENGANTAR ……...i
DAFTAR ISI ……...……...…ii
DAFTAR TABEL ……..……...…iii
DAFTAR GAMBAR……..……...…iv

BAB I PENDAHULUAN.....……1

BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI KENDARI
a) Keadaan Perkara Tingkat Pertama……6
b) Keadaan Perkara Tingkat Banding……8
c) Keadaan Perkara Tingkat Kasasi……...9
d) Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali……..….10
B. PENYELESAIAN PERKARA
a) Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu ..……..….....11
b) Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali…....…….…..12
c) Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif ……..……...14
d) Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi…….15
e) Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi…….……...…..15
f) Perkara Perdata & PHI yang Menggunakan e-Court…….....……15
g) Perkara Pidana & Tipikor yang Dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu) …….....16
h) Layanan Perkara Pidana & Tipikor yang Diajukan secara Elektronik (e-Berpadu) ……..……17
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)
a) Posbakum…….…18
b) Sidang keliling/pelayanan terpadu……...…18
c) Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara……...……18

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA
A. Komposisi SDM berdasarkankepangkatan/golongan/Pendidikan...19
B. Mutasi…….....24
C. Promosi……..…..26
D. Pensiun/Meninggal Dunia…….....27
E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)….28

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, TEKNOLOGI INFORMASI
A. Pengelolaan Keuangan…….…....31
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana…….…...32

C. Pengelolaan Teknologi Informasi…….....38
- Implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Umum……41
- Implementasi e-Berpadu di lingkungan Peradilan Umum..…43
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum……44

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan…….....46
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)……..48
C. Inovasi Pelayanan Publik……..50

BAB VI Pengawasan
A. Internal…….…….62
B. Evaluasi……..…64

BAB VII Penutup
A. Kesimpulan…….....66
B. Rekomendasi…….68

Lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Keseluruhan di Tingkat Pertama..... 6

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Perdata di Tingkat Pertama..... 7

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Pidana di Tingkat Pertama..... 7

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tipikor di Tingkat Pertama..... 7

Tabel 2.5. Keadaan Perkara PHI di Tingkat Pertama..... 7

Tabel 2.6. Keadaan Perkara Tingkat Banding..... 8

Tabel 2.7. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi..... 9

Tabel 2.8. Keadaan Perkara Tingkat PK.....10

Tabel 2.9. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.....11

Tabel 2.10. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....12

Tabel 2.11. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....13

Tabel 2.12 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.....14

Tabel 2.13 Perkara yang yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif .....14

Tabel 2.14. Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi.....15

Tabel 2.15. Perkara anak yang Berhasil Melalui Diversi.....15

Tabel 2.16. Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court.....15

Tabel 2.17. Perkara PHI yang Menggunakan eCourt.....15

Tabel 2.18. Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu).....16

Tabel 2.19. Perkara Tipikor yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu).....16

Tabel 2.20. Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu).....17

Tabel 2.21. Layanan Perkara Tipikor yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu).....17

Tabel 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan.....19

Tabel 3.2. Tabel Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Golongan.....22

Tabel 3.3. Tabel Nama Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Kendari.....22

Tabel 3.4. Daftar Mutasi Keluar.....24

Tabel 3.5. Daftar Mutasi Masuk.....25
Tabel 3.6. Daftar Promosi.....26
Tabel 3.7. Daftar Pensiun.....27
Tabel 3.8. Daftar Meninggal Dunia.....27
Tabel 3.9. Daftar Pegawai yang mengikuti Diklat/Pelatihan.....28
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran DIPA 005.01.2.099659.2025.....31
Tabel 4.2. Realisasi Anggaran DIPA 005.03.2.099660.2025.....31
Tabel 4.3. PNBP DIPA 005.01.2000.099659.....32
Tabel 4.4. Kode Akun PNBP DIPA 01.....32
Tabel 4.5. PNBP DIPA 005.03.2000.099660.....32
Tabel 4.6. Kode Akun PNBP DIPA 01.....32
Tabel 4.7. Data Aset Tanah dan Bangunan.....32
Tabel 4.8. Data Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (ermpat).....35
Tabel 4.9. Data Aset Kendaraan Dinas Roda 2 (dua).....35
Tabel 4.10. Data Ruang Kerja.....36
Tabel 4.11. Daftar Ruangan Pendukung.....36
Tabel 4.12. Daftar Ruangan Pendukung pada Tipikor.....37
Tabel 4.13. Daftar Ruangan Pendukung.....37
Tabel 4.14. Daftar Perangkat Keras (*Hardware*).....41
Tabel 4.15. Perkara Pidana & Tipikor yang Diajukan Melalui e-Berpadu.....44
Tabel 4.16. Layanan Perkara Pidana & Tipikor yang Diajukan Melalui e-Berpadu.....44
Tabel 4.17. Daftar Capaian SIPP PN Kendari Tahun 2025.....45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor Pengadilan Negeri Kendari di Tipulu dan Baruga..... 1

Gambar 3.1. SDM Berdasarkan Pendidikan..... 23

Gambar 3.2. SDM Berdasarkan Golongan dan Ruang..... 23

Gambar 5.1. Piagam Penghargaan Nominasi Finalis dan Harapan III Lomba PTSP..... 49

Gambar 5.2. Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat..... 51

Gambar 5.3. Youtube, Facebook dan Instagram..... 52

Gambar 5.4. Aplikasi PTSP..... 53

Gambar 5.5. Layar Monitor Informasi..... 53

Gambar 5.6. LCD Monitor Terhubung dengan SIPP..... 54

Gambar 5.7. Pojok *E-Court*..... 54

Gambar 5.8. Leaflet Informasi Layanan..... 55

Gambar 5.9. EDC BRI..... 55

Gambar 5.10. Antrian Pelayanan PTSP..... 56

Gambar 5.11. Layanan Buku Braille..... 56

Gambar 5.12. Website Layanan Disabilitas..... 57

Gambar 5.13. Kompensasi Untuk Pengguna Layanan..... 57

Gambar 5.14. Sarana dan Prasarna Disabilitas..... 52

Gambar 5.15. Si Ulandari..... 59

Gambar 5.16. Aplikasi V-LARI..... 59

Gambar 5.17. Arena Bermain PN Kendari..... 60

Gambar 5.18. Ruang Perawatan..... 60

Gambar 5.19. Ruang Laktasi.....61

Gambar 5.20. Ruang Terbuka Tamu Online..... 61

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Kebijakan Umum Peradilan



Gambar 1.1. Kantor Pengadilan Negeri Kendari di Tipulu dan Baruga

Pengadilan Negeri Kendari merupakan satuan kerja Lembaga Peradilan Kota yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di bawah Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang memiliki *locus delicti* di Kota Kendari.

Pengadilan Negeri Kendari sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut :

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan baik perkara pidana dan perdata;
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah daerah, apabila diminta dan melaksanakan tugas serta kewenangan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara atau sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya di wilayah hukum Kota Kendari dan sekitarnya;
3. Memberikan kontribusi hukum dalam upaya pembangunan hukum nasional.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Pengadilan Negeri Kendari merumuskan kebijakan-kebijakan peradilan. Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan peradilan, Pengadilan Negeri Kendari mengacu pada kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menaunginya.

Salah satu kebijakan peradilan yang mendasar untuk merespon ekspektasi masyarakat yang menginginkan lembaga peradilan yang agung sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya, adalah Penyatuan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI.

Selain itu, diterbitkan juga cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Cetak biru pembaharuan Pengadilan 2010-2035 ini memuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima tahun) mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan,

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional,
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis TI (Teknologi Informasi) terpadu.

Dalam melaksanakan program Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035 ini, terdapat beberapa agenda yang menjadi prioritas, yaitu :

1. Meningkatkan upaya pemulihan kepercayaan dunia hukum dan masyarakat terhadap profesionalisme, integritas dan kewibawaan serta martabat peradilan;
2. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dan eksternal dari masyarakat serta upaya pemberantasan KKN;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penggunaan teknologi baru di setiap pengadilan;
4. Meningkatkan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman.

## B. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kendari. Visi Pengadilan Negeri Kendari mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KENDARI YANG AGUNG"***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Kendari, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kendari;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kendari;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kendari.

## C. Rencana Strategis

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kendari tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai keefektifan dan keefesiensian.

Selanjutnya rencana strategis Pengadilan Negeri Kendari 2025-2029 digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Kendari yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029. Selain itu, rencana strategis ini digunakan sebagai pengendalian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Kendari dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Adapun dasar penyusunan strategis tersebut dapat diimplementasikan melalui 2 (dua) strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas

   Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan, menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu, meningkatkan segala upaya dan dana serta diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Kendari pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi Efisiensi

   Strategi efisiensi berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Kendari yang tidak mungkin dipertahankan keberadaannya.

Sedangkan dalam perumusannya, rencana strategis Pengadilan Negeri Kendari 2025-2029 di dasarkan pada IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Kendari. IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Kendari ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor

2381/KPN.W23-U1/SK.KP3.4.1/XII/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kendari.

Indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Secara garis besar sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kendari adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

# BAB II KEADAAN PERKARA

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari suatu instansi, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Kendari sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi Pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas struktural.

## A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Kendari

### a) Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Kendari pada Tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rasio penanganan perkara dari Tahun 2024 sebesar 87,70% menjadi 81,73% di Tahun 2025. Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kendari pada Tahun 2025 masuk ke dalam klasifikasi 501-1000 perkara dan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang masuk ke klasifikasi penanganan perkara 1001-2000 perkara. Jumlah perkara Pengadilan Negeri Kendari yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 952 perkara, sisa perkara pada tahun 2024 sebanyak 137 perkara sehingga beban yang dimiliki Pengadilan Negeri Kendari sebanyak 1.089 perkara, dengan perkara yang diputus sebanyak 890 perkara sehingga perkara sisa di Tahun 2025 yang masih dalam proses persidangan yaitu sebanyak 199 perkara. Berikut tabel keadaan perkara di Pengadilan Negeri Kendari :

- **Keadaan Keseluruhan Perkara di Pengadilan Negeri Kendari**

| JENIS PERKARA | SISA TAHUN 2024 | MASUK TAHUN 2025 | JUMLAH BEBAN | PUTUS MINUTASI 2025 | CABUT/ GUGUR 2025 | SISA TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdata | 42 | 330 | 372 | 235 | 68 | 69 |
| Pidana | 75 | 534 | 609 | 509 | 3 | 97 |
| Tipikor | 15 | 64 | 79 | 49 | 0 | 30 |
| PHI | 5 | 24 | 29 | 26 | 0 | 3 |
| **Jumlah** | **137** | **952** | **1089** | **819** | **71** | **199** |

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Keseluruhan di Tingkat Pertama

- **Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kendari**

| PERKARA | SISA TAHUN 2024 | MASUK TAHUN 2025 | JUMLAH BEBAN | PUTUS MINUTASI 2025 | CABUT/ GUGUR 2025 | SISA TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gugatan | 38 | 154 | 192 | 102 | 31 | 59 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 22 | 22 | 19 | 2 | 1 |
| Permohonan | 0 | 141 | 141 | 107 | 33 | 1 |
| Permohonan Konsinyasi | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Perlawanan/Bantahan | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| **Jumlah** | **42** | **330** | **372** | **235** | **68** | **69** |

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Perdata di Tingkat Pertama

- **Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kendari**

| PERKARA | SISA TAHUN 2024 | MASUK TAHUN 2025 | JUMLAH BEBAN | PUTUS MINUTASI 2025 | CABUT/ GUGUR 2025 | SISA TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidana Biasa | 73 | 486 | 559 | 462 | 0 | 97 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 1 | 19 | 20 | 17 | 3 | 3 |
| **Jumlah** | **75** | **534** | **609** | **509** | **3** | **97** |

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Pidana di Tingkat Pertama

- **Keadaan Perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Kendari**

| PERKARA | SISA TAHUN 2024 | MASUK TAHUN 2025 | JUMLAH BEBAN | PUTUS MINUTASI 2025 | CABUT/ GUGUR 2025 | SISA TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipikor | 15 | 64 | 79 | 49 | 0 | 30 |
| **Jumlah** | **15** | **64** | **79** | **49** | **0** | **30** |

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tipikor di Tingkat Pertama

- **Keadaan Perkara PHI di Pengadilan Negeri Kendari**

| PERKARA | SISA TAHUN 2024 | MASUK TAHUN 2025 | JUMLAH BEBAN | PUTUS MINUTASI 2025 | CABUT/ GUGUR 2025 | SISA TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 5 | 24 | 29 | 26 | 0 | 3 |
| **Jumlah** | **5** | **24** | **29** | **26** | **0** | **3** |

Tabel 2.5. Keadaan Perkara PHI di Tingkat Pertama

**b) Keadaan Perkara Tingkat Banding**

| Jenis Perkara | Sisa Perkara Banding Tahun 2024 | Perkara yang Diajukan Banding Tahun 2025 | Jumlah Beban | Cabut | Putus di PT | Sisa Perkara Banding 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gugatan | 5 | 30 | 35 | 0 | 28 | 7 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Konsinyasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan/ Bantahan | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Pidana Biasa | 9 | 48 | 57 | 7 | 40 | 10 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pidana Pra Peradilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIPIKOR | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **17** | **91** | **108** | **8** | **81** | **19** |

Tabel 2.6. Keadaan Perkara Tingkat Banding

### c) Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

| Jenis Perkara | Sisa Perkara Kasasi Tahun 2024 | Perkara yang Diajukan Kasasi 2025 | Cabut | Putus di MA | Sisa Perkara Kasasi 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gugatan | 15 | 19 | 0 | 26 | 8 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Konsinyasi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Perlawanan/ Bantahan | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Pidana Biasa | 8 | 25 | 2 | 22 | 9 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pidana Pra Peradilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIPIKOR | 8 | 7 | 0 | 13 | 2 |
| PHI | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 |
| **Jumlah** | **36** | **68** | **5** | **72** | **27** |

Tabel 2.7. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

### d) Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

| Jenis Perkara | Sisa Perkara PK Tahun 2023 | Perkara yg Mengajukan PK Tahun 2024 | Cabut | Putus MA | Sisa Perkara PK Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gugatan | 7 | 20 | 0 | 15 | 12 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Konsinyasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan/ Bantahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Biasa | 8 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana LL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Pra Peradilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIPIKOR | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **21** | **26** | **1** | **27** | **19** |

Tabel 2.8. Keadaan Perkara Tingkat PK

## B. Penyelesaian Perkara

### a) Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

| Jenis Perkara | Sisa Tahun Lalu 2024 | Masuk Tahun 2025 | Jumlah Beban | Putus | Putus Tepat Waktu | Sisa | Tidak Tepat Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gugatan | 38 | 154 | 192 | 133 | 108 | 59 | 25 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 22 | 22 | 21 | 19 | 1 | 2 |
| Permohonan | 0 | 141 | 141 | 140 | 139 | 1 | 1 |
| Permohonan Konsinyasi | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Perlawanan/ Bantahan | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| Pidana Biasa | 73 | 486 | 559 | 462 | 458 | 97 | 4 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 23 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Pidana Pra Peradilan | 1 | 19 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| TIPIKOR | 15 | 64 | 79 | 49 | 49 | 30 | 0 |
| PHI | 5 | 24 | 29 | 26 | 25 | 3 | 1 |
| **Jumlah** | **137** | **952** | **1089** | **890** | **856** | **199** | **34** |

Tabel 2.9. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

**b) Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK**

- **Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

| Jenis Perkara | Perkara Putus PN di Tahun 2025 | Perkara Putus PN Tahun 2025 yang Diajukan Banding | Perkara Putus Banding di Tahun 2025 | Perkara Tidak Mengajukan Banding di Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gugatan | 133 | 30 | 23 | 103 |
| Gugatan Sederhana | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Permohonan | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Permohonan Konsinyasi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Perlawanan/ Bantahan | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Pidana Biasa | 462 | 48 | 33 | 414 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Pidana Anak | 24 | 3 | 3 | 21 |
| Pidana Pra Peradilan | 20 | 0 | 0 | 20 |
| TIPIKOR | 49 | 6 | 5 | 43 |
| PHI | 26 | 0 | 0 | 26 |
| **Jumlah** | **890** | **91** | **67** | **799** |

Tabel 2.10. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

➢ **Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

| Jenis Perkara | Perkara Putus PN di Tahun 2025 | Perkara Putus PN Tahun 2025 yang Diajukan Kasasi | Perkara Putus Kasasi di Tahun 2025 | Perkara Tidak Mengajukan Kasasi di Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gugatan | 133 | 17 | 10 | 116 |
| Gugatan Sederhana | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Permohonan | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Permohonan Konsinyasi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Perlawanan/ Bantahan | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Pidana Biasa | 462 | 25 | 14 | 437 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Pidana Anak | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Pidana Pra Peradilan | 20 | 1 | 1 | 19 |
| TIPIKOR | 49 | 7 | 5 | 42 |
| PHI | 26 | 10 | 3 | 16 |
| **Jumlah** | **890** | **63** | **36** | **827** |

Tabel 2.11. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

➢ **Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

| Jenis Perkara | Perkara Putus di PN | Perkara Diajukan PK | Perkara Putus PK | Perkara Tidak Mengajukan PK |
|---|---|---|---|---|
| Gugatan | 133 | 17 | 11 | 116 |
| Gugatan Sederhana | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Permohonan | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Permohonan Konsinyasi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Perlawanan/ Bantahan | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Pidana Biasa | 462 | 5 | 3 | 457 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Pidana Anak | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Pidana Pra Peradilan | 20 | 0 | 0 | 20 |
| TIPIKOR | 49 | 18 | 10 | 31 |
| PHI | 26 | 0 | 0 | 26 |
| **Jumlah** | **890** | **40** | **24** | **850** |

Tabel 2.12. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

**c) Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**

| Jenis Perkara | Jumlah Perkara yg Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif | Jumlah Perkara yg Berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif | Jumlah Perkara yg Tidak Berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif |
|---|---|---|---|
| Pidana | 35 | 4 | 31 |
| **Jumlah** | 35 | 4 | 31 |

Tabel 2.13. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

### d) Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi

| Perkara | Sisa Mediasi Tahun 2024 | Mediasi Berjalan Tahun 2025 | Jumlah Beban | Mediasi Berhasil | Mediasi Tidak Berhasil | Tidak Dapat Dilaksanakan | Mediasi Berjalan /Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gugatan | 3 | 115 | 118 | 8 | 102 | 0 | 8 |

Tabel 2.14. Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi

### e) Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

| Perkara | Jumlah Perkara Pidana Anak Yg Masuk | Perkara Anak Yg Diajukan Diversi | Diversi Berhasil | Tidak Berhasil | Tidak Dapat Dilaksanakan/ Proses |
|---|---|---|---|---|---|
| Pidana Anak | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 |

Tabel 2.15. Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

### f) Jumlah Perkara Perdata & PHI yang Menggunakan e-Court

| Perkara | Jumlah Perkara Perdata yang Diajukan | Jumlah Perkara Perdata yang Diajukan menggunakan e-Court | Jumlah Perkara Perdatayang Diajukan Secara Konvensional |
|---|---|---|---|
| Gugatan | 154 | 154 | 0 |
| Gugatan Sederhana | 22 | 22 | 0 |
| Permohonan | 141 | 141 | 0 |
| Permohonan Konsinyasi | 3 | 3 | 0 |
| Perlawanan/Bantahan | 10 | 10 | 0 |
| **Jumlah** | **330** | **330** | **0** |

Tabel 2.16. Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court

| Perkara | Jumlah Perkara PHI yang Diajukan | Jumlah Perkara PHI yang Diajukan menggunakan e-Court | Jumlah Perkara PHI yang Diajukan Secara Konvensional |
|---|---|---|---|
| PHI | 24 | 24 | 0 |
| **Jumlah** | **24** | **24** | **0** |

Tabel 2.17. Perkara PHI yang Menggunakan e-Court

**g) Jumlah Perkara Pidana & Tipikor yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu)**

| Perkara | Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan | Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Elektronik menggunakan e-Berpadu | Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Konvensional |
|---|---|---|---|
| Pidana Biasa | 486 | 486 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 6 | 0 | 6 |
| Pidana Anak | 23 | 23 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 19 | 0 | 19 |
| **Jumlah** | **534** | **509** | **25** |

Tabel 2.18. Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu)

| Perkara | Jumlah Perkara Tipikor Yang Dilimpahkan | Jumlah Perkara Tipikor Yang Dilimpahkan Secara Elektronik Menggunakan E-Berpadu | Jumlah Perkara Tipikor Yang Dilimpahkan Secara Konvensional |
|---|---|---|---|
| Tipikor | 64 | 64 | 0 |
| **Jumlah** | **64** | **64** | **0** |

Tabel 2.19. Perkara Tipikor yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu)

h) **Jumlah Layanan Perkara Pidana & Tipikor yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)**

| Perkara | Jumlah Layanan Perkara Pidana | Jumlah Layanan Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik Menggunakan E-Berpadu | Jumlah Layanan Pidana Yang Diajukan Secara Konvensional |
|---|---|---|---|
| Penyitaan | 943 | 943 | 0 |
| Penggeledahan | 198 | 198 | 0 |
| Pelimpahan Berkas | 573 | 573 | 0 |
| Perpanjangan Penahanan | 348 | 348 | 0 |
| Penetapan Diversi | 12 | 12 | 0 |
| Izin Besuk Tahan | 2498 | 2498 | 0 |
| Izin Keluar Tahanan | 4 | 0 | 4 |
| Permohonan Pembantaran | 0 | 0 | 0 |
| Perpanjangan Penahanan Banding | 168 | 168 | 0 |
| Perpanjangan Penahanan MA | 0 | 0 | 0 |
| Pinjam Pakai | 12 | 0 | 12 |
| **Jumlah** | **4756** | **4740** | **16** |

Tabel 2.20. Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)

| Perkara | Jumlah Layanan Perkara Tipikor | Jumlah Layanan Tipikor Yang Diajukan Secara Elektronik Menggunakan E-Berpadu | Jumlah Layanan Tipikor Yang Diajukan Secara Konvensional |
|---|---|---|---|
| Penyitaan | 148 | 148 | 0 |
| Penggeledahan | 30 | 30 | 0 |
| Pelimpahan Berkas | 64 | 64 | 0 |
| Perpanjangan Penahanan | 24 | 24 | 0 |
| Penetapan Diversi | 0 | 0 | 0 |
| Izin Besuk Tahan | 431 | 431 | 0 |
| Izin Keluar Tahanan | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Pembantaran | 0 | 0 | 0 |
| Perpanjangan Penahanan Banding | 75 | 75 | 0 |
| Perpanjangan Penahanan MA | 48 | 48 | 0 |
| Pinjam Pakai | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **820** | **820** | **0** |

Tabel 2.21. Layanan Perkara Tipikor yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)

## C. Program Prioritas Nasional

### a) Posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Kendari telah melaksanakan Posbakum melalui Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Kendari dengan LBH Permata Adil Sulawesi Tenggara pada tanggal 22 Januari 2025, dengan anggaran pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 44.000.000 dan untuk honor advokat/pengacara piket dengan jumlah target volume output sebesar 440 jam layanan (2 Org x 4 jam x 5 Hari x 11 Bulan). Dari anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 44.000.000 (100%) dari pagu anggaran dengan 440 jam layanan dengan total keseluruhan pengguna layanan sebanyak 227 orang pada Tahun 2025.

### b) Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya sidang keliling adalah untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Negeri sehingga dapat menghemat biaya dan menghemat waktu agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dan pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Kendari tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk sidang keliling/pelayanan terpadu.

### c) Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Perkara prodeo (layanan pembebasan biaya perkara) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Kendari tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo).

# BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan aset untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendari sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat para pencari keadilan.

## A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

**a) Berikut Daftar Pegawai Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan kepangkatan sebagai berikut :**

| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | 1 Orang |
| 2. | Wakil Ketua | 1 Orang |
| 3. | Hakim Karier | 7 Orang |
| 4. | Hakim Ad Hoc | 8 Orang |
| 5. | Panitera | 1 Orang |
| 6. | Sekretaris | 1 Orang |
| 7. | Panmud | 5 Orang |
| 8. | Kasub | 3 Orang |
| 9. | Panitera Pengganti | 13 Orang |
| 10. | Juru Sita | 5 Orang |
| 11. | Juru Sita Pengganti | 1 Orang |
| 12. | Pejabat Fungsional Kesekretariatan | 3 Orang |
| 13. | Staf Pelaksana | 32 Orang |
| | **TOTAL** | **81 Orang** |

Tabel 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

**b) Berikut detail Daftar Pegawai Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan kepangkatan sebagai berikut :**

| NO. | N A M A / N I P | PANGKAT / GOL. | PENDIDIKAN |
|---|---|---|---|
| 1. | RUSTAM, S.H., M.H.<br>19701011 199903 1 004 | Pembina Utama Muda<br>(IV/c) | MAGISTER |
| 2. | HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H.<br>NIP. 19741231 199303 2 001 | Pembina Utama Muda<br>(IV/c) | MAGISTER |
| 3. | FRANS WEMPIE SUPIT PANGEMANAN, S.H., M.H.<br>NIP. 19760126 200112 1 001 | Pembina Tk. I<br>(IV/b) | MAGISTER |
| 4. | ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H.<br>NIP. 19790708 200212 1 004 | Pembina Tk.I<br>(IV/b) | MAGISTER |
| 5. | ASRUL, S.E., M.M.<br>NIP. 19710824 200502 1 001 | Pembina<br>(IV/a) | MAGISTER |
| 6. | SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.<br>NIP. 19810614 200704 2 001 | Pembina<br>(IV/a) | SARJANA |
| 7. | JAMES MOCHTAR MASILI, S.H.<br>NIP. 19720613 199303 1 004 | Pembina<br>(IV/a) | SARJANA |
| 8. | WA ODE SANGIA, S.H.<br>NIP. 19800723 200805 2001 | Pembina<br>(IV/a) | SARJANA |
| 9. | MAHYUDIN, S.H.<br>NIP. 19820315 200805 1001 | Pembina<br>(IV/a) | SARJANA |
| 10. | ANDI NUR HASWAH, S.H.<br>NIP. 198112162008052001 | Pembina<br>(IV/a) | SARJANA |
| 11. | MISRAWATI, S.E., M.A.P.<br>NIP. 19850316 200904 2 004 | Pembina<br>(IV/a) | MAGISTER |
| 12. | BENY KRISTIAN LABAN, S.Kom., M.M.<br>NIP. 19800228 200904 1 004 | Pembina<br>(IV/a) | MAGISTER |
| 13. | MUH. RESKY ANUGRAH PRATAMA BUNGGASI, S.H., M.H.<br>NIP. 19850310 201101 1 015 | Pembina<br>(IV/a) | MAGISTER |
| 14. | BUDIMAN, S.E., M.E.<br>NIP. 19810520 201001 1 027 | Pembina<br>(IV/a) | MAGISTER |
| 15. | MUHAMMAD SAIN W, S.H., M.H.<br>NIP. 19691024 199203 1 001 | Pembina<br>(IV/a) | MAGISTER |
| 16. | SOFYAN, S.H.<br>NIP. 19700807 199203 1 004 | Penata Tk. I<br>(III/d) | SARJANA |
| 17. | ERNI WAHID, S.H.<br>NIP. 19660106 198603 2 003 | Penata Tk. I<br>(III/d) | SARJANA |
| 18. | DJAYADI, S.H.<br>NIP. 19681015 198903 1 004 | Penata Tk. I<br>(III/d) | SARJANA |
| 19. | SJAHRUL, S.H.<br>NIP. 197201051993031003 | Penata Tk. I<br>(III/d) | SARJANA |
| 20. | LA ODE ALAMA WUNA KARMAN, S.H.<br>NIP. 19810112 200704 1001 | Penata Tk. I<br>(III/d) | SARJANA |
| 21 | NURMIATY, S.H<br>NIP. 19780921 2002 12 2 002 | Penata Tk. I<br>(III/d) | SARJANA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | WA ODE NUR IQAMAH, S.T.<br>NIP. 19841218 200904 2 009 | Penata Tk. I (III/d) | SARJANA |
| 23. | AKIRA HASBULLAH ISAMU, S.E.M.A.P<br>NIP. 19811118 200904 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | MAGISTER |
| 24. | HANS PRAYUGOTAMA, S.H., M.H<br>NIP. 19860210 200912 1 004 | Penata Tk. I (III/d) | MAGISTER |
| 25. | DARWIS, S.H., M.H<br>NIP. 19830103 200912 1 006 | Penata Tk. I (III/d) | MAGISTER |
| 26. | MUJIRUN, S.H., M.H<br>NIP. 19790416 200212 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | MAGISTER |
| 27. | FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.<br>NIP. 19750210 200912 1 003 | Penata Tk. I (III/d) | SARJANA |
| 28. | NURDIN, S.H., M.H.<br>NIP. 19840530 200912 1 004 | Penata Tk. I (III/d) | MAGISTER |
| 29. | ARJUNA MALAKA, S.E.<br>NIP. 19730329 200604 1 013 | Penata Tk. I (III/d) | SARJANA |
| 30. | ZULFIKAR, S.H<br>NIP. 19840414 201101 1 009 | Penata Tk. I (III/d) | SARJANA |
| 31. | PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H.,M.A.P<br>NIP. 19861124 201101 2 014 | Penata Tk.I (III/d) | MAGISTER |
| 32. | ARRIYANI, S.H., M.H<br>NIP. 19860211 200502 2 001 | Penata Tk.I (III/d) | MAGISTER |
| 33. | A. DEWI ZUKHRUFI, S.H., M.H.<br>NIP. 19870823 200604 2 001 | Penata Tk.I (III/d) | MAGISTER |
| 34. | IRAYANA, S.H., M.H.<br>NIP. 19790617 200604 2 004 | Penata Tk.I (III/d) | MAGISTER |
| 35. | FRANSISKA SOKO, S.H., M.H<br>NIP. 19740225 200604 2 001 | Penata Tk.I (III/d) | MAGISTER |
| 36. | SARLAN, S.H.<br>NIP. 19870110 200604 1 002 | Penata Tk.I (III/d) | SARJANA |
| 37. | RISNAWATI, S.H.<br>NIP. 19790426 200502 2 001 | Penata Tk.I (III/d) | SARJANA |
| 38. | LA ODE ALISABIR, S.H., M.H.<br>NIP. 19900127 200912 1 002 | Penata Tk.I (III/d) | MAGISTER |
| 39. | SUMARDIN KETE, S.SI., M.H<br>NIP. 19790616 200604 1 004 | Penata (III/c) | MAGISTER |
| 40. | SYAHRAENI LOVELYA N, S.H.<br>NIP. 19871028 200604 2 001 | Penata (III/c) | SARJANA |
| 41. | AMELIA BURHANUDDIN, S.H.<br>NIP. 19850113 200912 2 002 | Penata Muda Tk.I (III/b) | SARJANA |
| 42. | NIRMALASARI IDRIS, S.H., M.H.<br>NIP. 19890123 200912 2 002 | Penata Muda Tk.I (III/b) | MAGISTER |
| 43. | ASRI NURUL UTAMI, S.A.P.<br>NIP. 19950109 202203 2 004 | Penata Muda (III/a) | SARJANA |
| 44. | DERY FENADIAN, S.H.<br>NIP. 19980823 202405 1 001 | Penata Muda (III/a) | SARJANA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45. | MUHAMMAD ARIF RAHMAN ANWAR, S.H.<br>NIP. 19950703 202405 1 001 | Penata Muda (III/a) | SARJANA |
| 46. | FAIZ DAFFA' MUHAYAT, S.H.<br>NIP. 20000519 202405 1 002 | Penata Muda (III/a) | SARJANA |
| 47. | ABD HAQUL YAQIN, S.H<br>NIP. 19860925 201407 1 001 | Penata Muda (III/a) | SARJANA |
| 48. | UDUR MARCELINA SAMOSIR, S.S.I<br>NIP. 19951002 202012 2 007 | Penata Muda (III/a) | SARJANA |
| 49. | NURUL SARAS WATI, S.T.<br>NIP. 199511172025062007 | Penata Muda (III/a) | SARJANA |
| 50. | CAHAYA ARIEL AMELIA SIMANGUNSONG, S.H.<br>NIP. 200108282025062016 | Penata Muda (III/a) | SARJANA |
| 51. | KHAERUNNISA AL MUDASSIR, S.H.<br>NIP. 20030215 202506 2 003 | Penata Muda (III/a) | SARJANA |
| 52. | M I N<br>NIP. 19680823 199303 1 004 | Pengatur Tk.I (II/d) | S M A |
| 53. | ADE DAYANULLLAH<br>NIP. 19870101 200912 1005 | Pengatur Tk. I (II/d) | S M K |
| 54. | TIRTA HARDIYANTI, A.Md.A.B.<br>NIP. 19971020 202203 2 013 | Pengatur (II/c) | AHLI MADYA |
| 55. | MUHAMMAD RONAL DIAS RAMADHAN, A.Md.A.B.<br>NIP. 19980124 202203 1 009 | Pengatur (II/c) | AHLI MADYA |
| 56. | ADE RATNA MASFUFAH, A.Md.<br>NIP. 19990106 202203 2 014 | Pengatur (II/c) | AHLI MADYA |
| 57. | ENDAH MAYANGSARI, A.Md.M.<br>NIP.19990312 202506 2 009 | Pengatur (II/c) | AHLI MADYA |
| 58. | INTAN DEWI SAFITRI, A.Md.M.<br>NIP. 200109102025062010 | Pengatur (II/c) | AHLI MADYA |

Tabel 3.2. Tabel Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

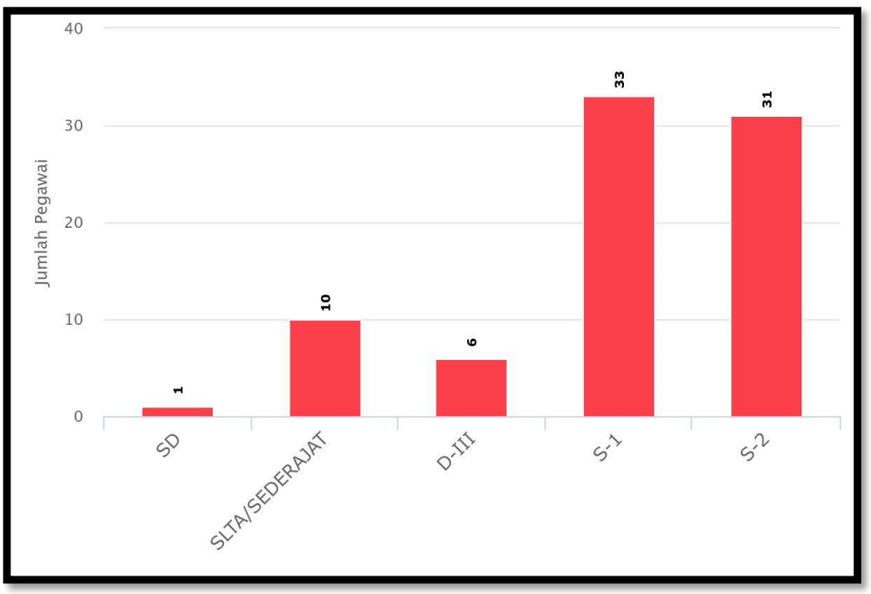
**c) Daftar Hakim Adhoc Pengadilan Negeri Kendari sebagai berikut :**

| NO | N A M A | JABATAN | PENDIDIKAN |
|---|---|---|---|
| **1.** | Drs. PARSUNGKUNAN, S.H.<br>NIP. 19600218 0220220 1 044 | Hakim Adhoc Tipikor | Strata 1 |
| **2.** | MUH. RUTABUZ ZAMAN, S.H., M.H.<br>NIP.19810123 0220220 1 054 | Hakim Adhoc Tipikor | Magister |
| **3.** | MAHARDIAN, S.H., M.H.<br>NIP. 19820421 0220180 7041 | Hakim Adhoc PHI | Magister |
| **4.** | ARDIAN HAMDANI, S.H., M.H.<br>NIP. 19770125 0220230 2 010 | Hakim Adhoc Tipikor | Magister |
| **5.** | ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.<br>NIP.19670807 0220111 0 049 | Hakim Adhoc Tipikor | Magister |
| **6.** | MUHAMMAD NURJALIL, S.H., M.H.<br>NIP. 73020 2041167 0 002 | Hakim Adhoc Tipikor | Magister |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7.** | DARYONO, S,H.,M.H<br>NIP. 3302260407750001 | Hakim Adhoc PHI | Magister |
| **8.** | INDRA GUNAWAN, S.H<br>NIP. 3201382111900005 | Hakim Adhoc PHI | Sarjana |

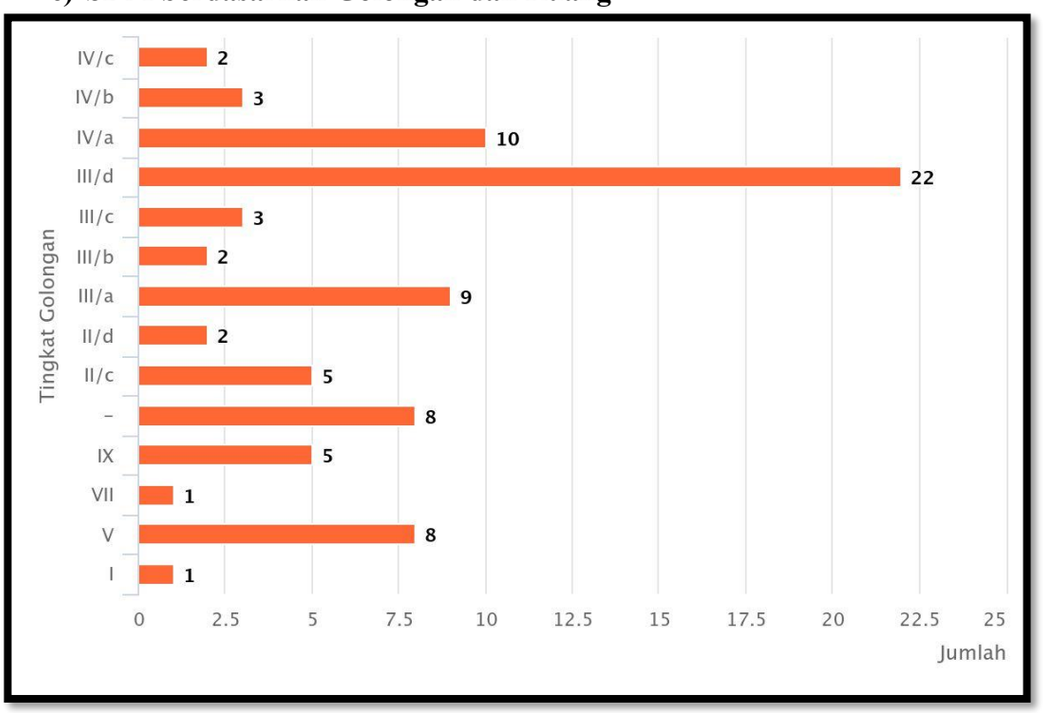
Tabel 3.3. Tabel Nama Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Kendari

**d) SDM Berdasarkan Pendidikan**




Gambar 3.1. SDM Berdasarkan Pendidikan

**e) SDM berdasarkan Golongan dan Ruang**




Gambar 3.2. SDM Berdasarkan Golongan dan Ruang

## B. MUTASI

### a) Mutasi Keluar

| Tanggal Mutasi Keluar | Nama/NIP | Satker Asal | Satker Tujuan | SK |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | SAFRI, S.H., M.H.<br>NIP. 196906081997021001 | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Pengadilan Negeri Surabaya Sulawesi Tenggara | SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1624/DJU/SK.KP4.1.3/ X/2025 tgl. 01/10/2025 |
| 04/06/2025 | H. BUDI WINATA, S.H., M.H.<br>NIP. 197408301999031005 | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Pengadilan Negeri Palu Klas IA Sulawesi Tengah | SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1022/DJU/SK.KP4.1.3/ V/2025 tgl. 08/05/2025 |
| 05/12/2025 | ARMIN, S.H., M.H.<br>NIP. 196512311989031036 | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara | SK DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM No. 1133/DJU/SK.KP4.1.3/ VIII/2025 tgl. 12/08/2025 |
| 19/09/2025 | SURIPTO, S.H.<br>NIP.197010091993011001 | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Pengadilan Negeri Pasarwajo Klas II Sulawesi Tenggara | SK DIRJEN BADILUM No. 1133/DJU/SK.KP4.1.3/ VIII/2025 tgl. 12/08/2025 |
| 22/09/2025 | BERNADETHE NISAWATY, S.H.<br>NIP.197208111999032003 | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Pengadilan Negeri Andoolo Klas II Sulawesi Tenggara | SK DIRJEN BADILUM No. 1133/DJU/SK.KP4.1.3/ VIII/2025 tgl. 12/08/2025 |
| 13/06/2025 | WAHYU BINTORO, S.H.<br>NIP.197608232002121002 | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Klas IA Khusus DKI Jakarta | SK DIRJEN BADILUM No. 1022/DJU/SK.KP4.1.3/ V/2025 tgl. 08/05/2025 |
| 12/12/2025 | ENTENG, S.H.<br>197904052001121004 | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Pengadilan Negeri Lasusua Klas II Sulawesi Tenggara | SK DIRJEN BADILUM No. 1658/DJU/SK.KP4.1.3/ XI/2025 tgl. 06/11/2025 |
| 19/09/2025 | LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, S.H.<br>NIP.198603192006041001 | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Pengadilan Negeri Kolaka Klas IB Sulawesi Tenggara | SK DIRJEN BADILUM No. 1133/DJU/SK.KP4.1.3/ VIII/2025 tgl. 12/08/2025 |

Tabel 3.4. Daftar Mutasi Keluar

**b) Mutasi Masuk**

| Tanggal Mutasi Masuk | Nama/NIP | Satker Asal | Satker Tujuan | SK |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | RUSTAM, S.H., M.H. 197010111999031004 | Pengadilan Negeri Mamuju Klas IA Sulawesi Barat | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1624/DJU/SK.KP4.1.3/ X/2025 tgl. 01/10/2025 |
| 29/10/2025 | HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H. NIP.197412311993032001 | Pengadilan Negeri Pemalang Klas IB Jawa Tengah | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 1624/DJU/SK.KP4.1.3/ X/2025 tgl. 01/10/2025 |
| 22/09/2025 | ZULFIKAR, S.H. 198404142011011009 | Pengadilan Negeri Bau-bau Klas IB Sulawesi Tenggara | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 1133/DJU/SK.KP4.1.3/ VIII/2025 tgl. 12/08/2025 |
| 22/09/2025 | NURMIATY, S.H. NIP.197809212002122002 | Pengadilan Negeri Bau-bau Klas IB Sulawesi Tenggara | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 1133/DJU/SK.KP4.1.3/ VIII/2025 tgl. 12/08/2025 |
| 12/12/2025 | JAMES M MASILI, S.H. NIP.197206131993031004 | Pengadilan Negeri Kotamubago Klas IB Sulawesi Utara | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1658/DJU/SK.KP4.1/3/ XI/2025 tgl. 06/11/2025 |
| 03/11/2025 | ANDI NUR HASWAH, S.H. NIP.198112162008052001 | Pengadilan Negeri Sengkang Klas IB Sulawesi Selatan Tenggara | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | SK KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 1624/DJU/SK.KP4.1.3/ X/2025 tgl. 01/10/2025 |
| 01/06/2025 | NURUL SARAS WATI, S.T. | - | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Sekretaris Mahkamah Agung RI 4125/SEK/SK.KP1.1.6/ V/2025 |
| 01/06/2025 | CAHAYA ARIEL AMELIA, S.H. | - | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Sekretaris Mahkamah Agung RI 4288/SEK/SK.KP1.1.6/ V/2025 |
| 01/06/2025 | KHAERUNNISA AL MUDASSIR, S.H. | - | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Sekretaris Mahkamah Agung RI 5043/SEK/SK.KP1.1.6/ V/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | INTAN DEWI SAFITRI, A.Md. | - | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Sekretaris Mahkamah Agung RI 3258/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 |
| 01/06/2025 | ENDAH MAYANGSARI, A.Md. | - | Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara | Sekretaris Mahkamah Agung RI 3710/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 |

Tabel 3.5. Daftar Mutasi Masuk

**B. PROMOSI**

| TANGGAL PROMOSI | NAMA/NIP | PERUBAHAN GOLONGAN | PERUBAHAN JABATAN | SK |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | SAFRI, S.H., M.H.<br>NIP. 196906081997021001 | | Dari ketua Pengadilan Negeri Kendari menjadi Ketua Pengadilan Surabaya | SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 tgl. 01/10/2025 |
| 04/06/2025 | H. BUDI WINATA, S.H., M.H.<br>NIP. 197408301999031005 | - | Dari wakil ketua Pengadilan Negeri Kendari menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palu Klas IA | SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1022/DJU/SK.KP4.1.3/V/2025 tgl. 08/05/2025 |
| 05/12/2025 | ARMIN, S.H., M.H.<br>NIP. 196512311989031036 | - | Dari Panitera PN Kendari menjadi Panmud Pidana Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara | SK DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM No. 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tgl. 12/08/2025 |
| 19/09/2025 | SURIPTO, S.H.<br>NIP.197010091993011001 | - | Dari Panitera Muda Hukum PN Kendari menjadi Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Klas II Sulawesi Tenggara | SK DIRJEN BADILUM No. 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tgl. 12/08/2025 |
| 22/09/2025 | BERNADETHE NISAWATY, S.H.<br>NIP.197208111999032003 | - | Dari Panitera muda PHI PN Kendari menjadi Panitera Pengadilan Negeri | SK DIRJEN BADILUM No. 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Andoolo Klas II Sulawesi Tenggara | 025 tgl. 12/08/2025 |
| 12/12/2025 | ENTENG, S.H. 197904052001121004 | - | Dari Panitera Pengganti PN Kendari menjadi Panitera Pengadilan Negeri Lasusua Klas II Sulawesi Tenggara | SK DIRJEN BADILUM No. 1658/DJU/SK. KP4.1.3/XI/2025 tgl. 06/11/2025 |
| 19/09/2025 | LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, S.H. NIP.198603192006041001 | - | Dari Panitera Pengganti PN Kendari menjadi Pengadilan Negeri Kolaka Klas IB Sulawesi Tenggara | SK DIRJEN BADILUM No. 1133/DJU/SK. KP4.1.3/VIII/2025 tgl. 12/08/2025 |

Tabel 3.6. Daftar Promosi

## D. PENSIUN/MENINGGAL DUNIA

### a) Pensiun

| Tanggal Pensiun | Nama/NIP | SK |
|---|---|---|
| 16/02/2021 | SAHIR R. 196508031991031005 - | SK KETUA MAHKAMAH AGUNG RI No. 1690/DJU/SK/KP04.5/12/2020 tgl. 17/12/2020 |

Tabel 3.7. Daftar Pensiun

### b) Meninggal Dunia

| Tanggal Pensiun | Nama/NIP | SK |
|---|---|---|
| - | LA ODE MUH. SURYADI, S.H. 196906131990031003 | SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM No. 641/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 tgl. 22/04/2024 |

Tabel 3.8. Daftar Meninggal Dunia

## E. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat)

| No | Nama | Pelatihan/Diklat/Bimtek | Tanggal | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safri,SH,MH | Competition Law Seminar for Asia Pasific Judges | 29-39 Mei 2025 | Philippine Judicial Academy |
| 2 | Mahyudin,S.H. | Pelatihan *Professional Development For Indonesian Judges On Maritime Law and Maritime Crime* | 4-5 Juni 2025 | Pusdiklat Teknis Peradilan |
| 3 | Safri,S.H, M.H. | Manajemen Resiko Batch V Medan | 7 s.d 10 Juli 2025 | Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan |
| 4 | Asrul, S.E, M.M. | Bimtek Kesektariatan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara | 11 Juli 2025 | Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara |
| 5 | Wa Ode Nur Iqamah,S.T. | | | |
| 6 | Beny Kristian Laban,S.Kom, M.M. | | | |
| 7 | Misrawati,SE.,MA.P. | | | |
| 8 | Akira Hasbullah Isamu, S.E. | | | |
| 9 | Nirmalasari Idris, S.H, M.H. | | | |
| 10 | Budiman,S.E,. M.E. | | | |
| 11 | Ade Ratna Masfufah, A.Md. | | | |
| 12 | Nurul Saras Wati, S.T. | | | |
| 13 | SAFRI, S.H, M.H. | Rapat Koordinasi "Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata Terkait Eksekusi" | 16 Juli 2025 | Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara |
| 14 | Frans empie Supit Pangemanan, S.H, M.H. | | | |
| 15 | Arya Putra Negara K, S.H, M.H. | | | |
| 16 | Sulasmy Tri Juniarty, S.H. | | | |
| 17 | Wa Ode Sangia, S.H. | | | |
| 18 | Mahyudin, S.H. | | | |
| 19 | Hans Prayugotama, S.H. | | | |
| 20 | Drs.Parsungkunan, S.H. | | | |
| 21 | Ardian Hamdani, S.H, M.H. | | | |
| 22 | Mahardian, SH, M.H. | | | |
| 23 | Armin, S.H, M.H. | | | |
| 24 | Bernadethe Nisawaty, S.H, M.H. | | | |
| 25 | Ade Dayanullah | | | |
| 26 | Drs.Parsungkunan, S.H, M.H. | Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial | 24-26 Juli 2025 | Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial |
| 27 | Ardian Hamdani,S.H, M.H. | | | |
| 28 | Muh.Rutabuz Zaman S.H, M.H. | | | |
| 29 | AnuarSakti Sireagar, S.H, M.H. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Muhammad Nurjalil, S.H., M.H. | | | |
| 31 | Mahardian, S.H, M.H. | | | |
| 32 | Daryono, S.H, M.H. | | | |
| 33 | Indra Gunawan, S.H, M.H. | | | |
| 34 | Mahardian, S.H., M.H. | FGD Badan Keahlian DPR RI yang meliputi enam (6) jam pelajaran dengan tema:Dalam Rangka Uji Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim | 31 Juli 2025 | Badan Keahlian DPR RI |
| 35 | Nurul Saras Wati, S.T. | Pelatihan Dasar CPNS Gol.II dan Gol.III gelombang III secara *Distance Learning* Tahun 2025 | 30 Agustus - 25 November 2025 | Pusdiklat Menpin |
| 36 | Khaerunnisa Mudasir, S.H. | | | |
| 37 | Cahaya Aril Amelia Simangunsong, S.H. | | | |
| 38 | Intan Dewi Sartika, A.Md. | | | |
| 39 | Endah Mayang Sari, A.Md. | | | |
| 40 | Safri, S.H., M.H. | E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025 | 1 s.d 3 September 2025 | Pendidikan dan Pelatihan AntiKorupsi |
| 41 | Safri, S.H., M.H. | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 3 | 22 s.d 26 September 2025 | Pusdiklat Teknis Peradilan |
| 42 | Frans W S Pangemanan, S.H,.M.H. | | | |
| 43 | Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H, M.H. | | | |
| 44 | Wa Ode Sangia,S.H. | | | |
| 45 | Hans Prayugotama,S.H. | | | |
| 46 | Sulasmy Tri Juniarty, S.H. | Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan XXI Tahun 2025 | 22 Sept s.d 11 Oktober 2025 | Pusdiklat Teknis Peradilan |
| 47 | Sulasmy Tri Juniarty, S.H. | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 4 | 6 s.d 10 Oktober 2025 | Pusdiklat Teknis Peradilan |
| 48 | Ade Dayanullah | Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita di Lingkungan Peradilan Umum seluruh | 27 Oktober - 7 November 2025 | Pusdiklat Teknis Peradilan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Indonesia secara daring (e-learning dan zoom) | | |
| **49** | Sumardin Kete, S.SI. | Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita di Lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia secara daring (e-learning dan zoom) | 27 Oktober-7 November 2025 | Pusdiklat Teknis Peradilan |
| **50** | Armin,.S.H, M.H. | Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial bagi Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama lingkungan peradilan seluruh Indonesia | 30 Oktober – 1 November 2025 | Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial |
| **51** | A.Dewi Zukhrufi, S.H, M.H | Pelatihan Teknis Yudisial Panietra Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia secara daring (e-learning dan zoom) | 10-21 November 2025 | Pusdiklat Teknis Peradilan |
| **52** | La Ode Alam Wuna Karman, S.H., M.H. | Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia secara daring (e-learning dan zoom) | 10-21 November 2025 | Pusdiklat Teknis Peradilan |
| **53** | La Ode Alisabir, S.H., M.H. | Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia secara daring (e-learning dan zoom) | 10-21 November 2025 | Pusdiklat Teknis Peradilan |
| **54** | Ni Putu Novaini Ulandari, S.H, M.A.P. | Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia secara daring (e-learning dan zoom) | 10-21 November 2025 | Pusdiklat Teknis Peradilan |
| **55** | Hasrawati Yunus, S.H, M.H. | Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi | 24 November – 13 Desember 2025 | Pusdiklat Teknis Peradilan |
| **56** | Udur Marcelina Samosir, S.S.I. | Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional | 25 November – 28 November 2025 | Badan Urusan Administrasi |

Tabel 3.9. Daftar Pegawai yang mengikuti Diklat/Pelatihan

# BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pengelolaan yang baik dan tepat sasaran. Pengeloaan tersebut dimulai dengan keuangan, sarana prasarana, hingga pemanfaatan teknologi informasi.

## A. Pengelolaan Keuangan

### a) Realisasi Anggaran DIPA :

1. DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi )

| No. | Uraian | Pagu | Realisasi | Sisa Anggaran | Prosentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Pegawai | Rp 10.435.307.000 | Rp 10.435.145.797 | Rp 161.203 | 100 % |
| 2. | Belanja Barang | Rp 2.394.589.000 | Rp 2.339.997.967 | Rp 54.591.033 | 97,72 % |
| 3. | Belanja Modal | Rp 217.380.000 | Rp 217.380.000 | Rp 0 | 100 % |
| | **TOTAL** | **Rp 13.047.276.0000** | **Rp 12.992.523.764** | **Rp 175.575.969** | **98,64%** |

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran DIPA 005.01.2.099659.2025

2. DIPA 03 (Dirjen Badan Peradilan Umum)

| No. | Uraian | Pagu | Realisasi | Sisa Anggaran | Prosentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Barang | Rp 235.887.000 | Rp 231.265.865 | Rp 4.621.135 | 98,04% |

Tabel 4.2. Realisasi Anggaran DIPA 005.03.2.099660.2025

**b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):**

1. PNBP DIPA 01

| No | Diterima | Disetorkan | Prosentase (%) | Ket |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rp 23.814.537 | Rp 23.814.537 | 100% | - |

Tabel 4.3. PNBP DIPA 005.01.2000.099659

| No | Kode Akun | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | 425122 | 425231 | 425151 | 425912 | |
| PN Kendari | Rp 2.844.300 | Rp 7.800.000 | Rp 3.705.237 | Rp 9.465.000 | Rp 23.814.537 |

Tabel 4.4. Kode Akun PNBP DIPA 01

2. PNBP DIPA 03

| No | Diterima | Disetorkan | Prosentase (%) | Ket |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rp 36.620.500 | Rp 36.620.500 | 49,97 % | - |

Tabel 4.5. PNBP DIPA 005.03.2000.099660

| No | Kode Akun | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 425131 | 425231 | 425232 | 425233 | 425239 | |
| PN Kendari | 0 | Rp 31.170.000 | Rp 2.090.000 | Rp 5.060.000 | Rp 26.300.000 | Rp 36.620.500 |

Tabel 4.6. Kode Akun PNBP DIPA 03

**B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana**

- **Data Aset Tanah dan Bangunan Gedung**

| No. | Nama Satker | Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PN Kendari | 8 Sertifikat Bidang Tanah Seluas 15.185 m2 | - | 8 Bidang Tanah Seluas 15.185 m2 |

Tabel 4.7. Data Aset Tanah dan Bangunan

**Rincian sebagai berikut :**

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pengadilan Negeri Kendari) jalan Mayjen Sutoyo No.37 Kendari Sulawesi Tenggara berdiri diatas tanah seluas

**5.262 m2** sesuai dengan Sertifikat No. 084 tanggal 06-09-1971 senilai Rp11.779.934.000,- dengan luas bangunan 1.516 m2.

2. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pengadilan Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi) Jalan Piere Tendean Baruga Kendari Kecamatan Baruga Kelurahan Watubangga Kota Kendari, berdiri diatas tanah seluas **3.400 m2** sesuai dengan setifikat No.00004 tanggal 09-04-2012 senilai Rp3.641.944.000,- dengan luas bangunan 2.100 m2.
3. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I pada jalan Saranani, Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, seluas 1391 m2 sesuai dengan sertifikat No. 208 tanggal 08-10-1991 senilai Rp. 2.982.652.000,-
4. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I pada jalan Balaikota III, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, seluas 1391 m2 sesuai dengan sertifikat No. 0006 tanggal 16-04-2002 senilai Rp. 215.001.000,-
5. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I pada jalan Balaikota I, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari seluas 1205 m2 sesuai dengans sertifikat No. 212 tanggal 08-10-1991 senilai Rp. 1.154.011.984
6. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I pada jalan Made Sabara, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari seluas 278 m2 sesuai dengan sertifikat No.00252 tanggal 16-04-2002 senilai Rp. 816.758.706,-
7. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I pada jalan Balaikota IV, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari seluas 561 m2 sesuai dengan sertifikat No.00007 tanggal 16-04-2002 senilai Rp. 225.359.000,-
8. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I pada jalan Balaikota I, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari seluas 366 m2 sesuai dengan sertifikat No. 00277 tanggal 28-03-2022 senilai Rp. 350.512.710,-

**Pengadilan Negeri Kendari mempunyai 12 Rumah Dinas terdiri :**

1. Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 37 Kendari, berjumlah 1 unit luas tanah 1.161 m2 dan luas Bangunan 151 M2 senilai Rp.686.350.000 ,-

2. Rumah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Balai Kota III Kendari, berjumlah 1 Unit dengan luas tanah 204 m2 dan luas bangunan senilai Rp.65.728.000,-
3. Rumah Dinas Panitera Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Balai Kota I Kendari, berjumlah 1 unit dengan luas tanah 364 m2 dan luas bangunan 49 m2 senilai Rp339.360.000,-
4. Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Kijang Kendari , berjumlah 1 unit dengan luas tanah 350 m2 dan luas bangunan 70 m2 senilai Rp236.950.000,-
5. Rumah Dinas Pegawai Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Paedai Puncak , berjumlah 1 unit dengan luas tanah 500 m2 dan bangunan 120 m2 senilai Rp268.400.000,-
6. Rumah Dinas Pegawai Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Paedai Puncak , berjumlah 1 unit dengan luas tanah 500 m2 dan bangunan 120 m2 senilai Rp268.400.000,-
7. Rumah Dinas Pegawai Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Balaikota I, berjumlah 1 unit,dengan luas 420 m2 dan luas bangunan 49 m2 senilai Rp384.272.000,-
8. Rumah Dinas Pegawai Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Balaikota I, berjumlah 1 unit,dengan luas 420 m2 dan luas bangunan 49 m2 senilai Rp384.272.000,-
9. Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Balai Kota III, berjumlah 1 unit, dengan luas tanah 298 m2 dan luas 66 m2 senilai Rp44.896.000,-
10. Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Saranani Kendari, berjumlah 1 unit dengan luas tanah 687 m2 dan luas bangunan 70 m2 senilai Rp282.495.000,-
11. Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Saranani Kendari, berjumlah 1 unit dengan luas tanah 697 m2 dan luas bangunan 96 m2 senilai Rp674.194.000,-
12. Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Balai Kota I, Mandonga Kendari, berjumlah 1 unit dengan kondisi rumah rusak berat dengan luas tanah 405 m2 dan luas bangunan senilai Rp408.810.000,-

- **Data Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)**

| No | Jenis /Merk | No Polisi | Pengguna |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Innova 2.0 Venturer A/T-TGN140R-MDTHKD22 warna Super White | DT 5 E | Ketua Pengadilan Negeri Kendari |
| 2 | Toyota Innova type E DXL M/T warna hitam | DT 1025 E | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari |
| 3 | Toyota Innova type Innova GKMRKD warna hitam | DT 7208 E | Operasional PHI/Tipikor |
| 4 | Toyota Vios type T.NEW VIOS 1.5 G MT warna hitam | DT 106 E | Sekretaris Pengadilan Negeri Kendari |
| 5 | Toyota All New type Avanza G warna merah hati | DT 1031 E | Panitera Pengadilan Negeri Kendari |

Tabel 4.8. Data Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)

- **Data Aset Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)**

| No | Jenis /Merk | No Polisi | Pengguna |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Vega | DT 2713 E | Kasubag PTIP |
| 2 | Yamaha Vega | Dt 2714 e | APK APBN |
| 3 | Honda Revo | DT 2186 E | Panmud Perdata |
| 4 | Honda Revo | DT 2184 E | Pengelola BMN Sub Umum Keuangan |
| 5 | Honda Revo | DT 2185 E | Jurusita |

Tabel 4.9. Data Aset Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)

- **Ruang Sidang Pengadilan Negeri Kendari :**

►Gedung Pengadilan Negeri Kendari, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 37 Kendari mempunyai 4 (empat) ruang sidang yaitu :

1. Ruang sidang Kusuma Atmaja
2. Ruang sidang Wirjono Prodjodikoro
3. Ruang sidang Hatta Ali
4. Ruang sidang Anak

►Gedung Pengadilan Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), beralamat Jl. Piere Tendean, mempuyai 2 (dua) ruang sidang yaitu:

1. Ruang sidang perkara PHI / ruang sidang Bagir Manan
2. Ruang sidang perkara Tipikor / Ruang Sidang Altidjo Alkostar

- **Ruang Kerja**

►Ruang kerja Gedung Pengadilan Negeri Kendari, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 37 Kendari terdiri dari :

| No | Nama Ruang Kerja | Jumlah Ruangan | Ket |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruang Kerja Ketua | 1 (satu) ruangan | - |
| 2. | Ruang Kerja Wakil Ketua | 1 (satu) ruangan | - |
| 3. | Ruang Kerja Panitera | 1 (satu) ruangan | - |
| 4. | Ruang Kerja Sekretaris | 1 (satu) ruangan | - |
| 5. | Ruang Kerja Hakim | 5 (empat) ruangan | - |
| 6. | Ruang Kerja Panmud | 5 (empat) ruangan | - |
| 7. | Ruang Kerja Kasub | 3 (tiga) ruangan | - |
| 8. | Ruang Kerja Panitera Pengganti | 1 (satu) ruangan | - |
| 9. | Ruang Kerja PTSP | 1 (satu) ruangan | - |

Tabel 4.10. Data Ruang Kerja

- Ruangan Pendukung

| No | Nama Ruangan | Jumlah Ruangan | Ket |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruang *Media Center* | 1 (satu) ruangan | - |
| 2 | Ruang Server | 1 (satu) ruangan | - |
| 3 | Ruang Perpustakaan | 1 (satu) ruangan | - |
| 4 | Ruang Mediasi | 1 (satu) ruangan | - |
| 5 | Ruang Arsip | 2 (dua) ruangan | - |
| 6. | Ruang Bapas/ruang tunggu anak | 1 (satu) ruangan | - |
| 7. | Ruang Jaksa | 1 (satu) ruangan | - |
| 8. | Ruang Posbakum | 1 (satu) ruangan | - |
| 9. | Ruang Pengacara/ Ruang Mediator Non Hakim/Bapas/Peksos | 1 (satu) ruangan | - |
| 10. | Ruang Laktasi | 1 (satu) ruangan | - |
| 11. | Ruang Perawatan | 1 (satu) ruangan | - |
| 12. | Arena Bermain Anak | Ruang terbuka | |
| 13. | Ruang Tunggu Pengunjung | Ruang terbuka | - |
| 14. | Ruang Tahanan Pria | 1 (satu) ruangan | - |
| 15. | Ruang Tahanan Wanita | 1 (satu) ruangan | - |
| 16. | Ruang Tahanan Anak | 1 (satu) ruangan | - |
| 17. | Ruang Piket Jaga Malam | 1 (satu) ruangan | - |
| 18. | Toilet Tahanan | 2 (dua) unit | - |
| 19. | Toilet Umum Pria dan Wanita | 2 (dua) unit | - |
| 20. | Toilet Hakim dan Pegawai | 8 (delapan) unit | - |
| 21. | Toilet disabilitas | 1 (satu) unit | - |

Tabel 4.11. Daftar Ruangan Pendukung

► Ruang Kerja Gedung Pengadilan Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), beralamat Jl. Pierre Tendean, terdiri dari :

| No | Nama Ruang Kerja | Jumlah Ruangan | Ket |
|---|---|---|---|
| **1.** | Ruang Kerja Ketua dan Wakil | 1 (satu) ruangan | - |
| **2.** | Ruang Kerja Hakim Adhoc Tipikor | 1 (satu) ruangan | - |
| **3.** | Ruang Kerja Hakim Adhoc PHI | 1 (satu) ruangan | - |
| **4.** | Ruang Kerja Panmud Tipikor | 1 (satu) ruangan | - |
| **5.** | Ruang Kerja Panmud PHI | 3 (tiga) ruangan | - |
| **6.** | Ruang Panitera Pengganti/staf | 2 (dua) ruangan | - |

Tabel 4.12. Daftar Ruangan Pendukung pada Tipikor

- Ruangan Pendukung

| No | Nama Ruangan | Jumlah Ruangan | Ket |
|---|---|---|---|
| **1.** | Ruang PTSP | 1 (satu) ruangan | - |
| **2.** | Ruang Tahanan | 1 (satu) ruangan | - |
| **3.** | Ruang Arsip | 2 (dua) ruangan | - |
| **4.** | Ruang Pos Jaga | 1 (satu) ruangan | - |
| **5.** | Ruang Mushola | 1 (satu) ruangan | - |
| **6.** | Ruang Tunggu Keluarga Terdakwa | 2 (dua) ruangan | - |
| 7. | Ruang Tunggu Pengunjung Sidang | Teras depan ruang sidang PHI/Tipikor | - |
| 8. | Toilet | 5 (lima) ruangan | - |
| | Gudang | 1 (satu) ruangan | - |

Tabel 4.13. Daftar Ruangan Pendukung

- **Komputer Dan Internet**
  - Jumlah Laptop 8 Unit (aktif)
  - Jumlah PC 47 Unit (aktif)
  - Internet Pengadilan Negeri Kendari menggunakan Jaringan Astinet 20 Mbps dan Indihome 100Mbps sebanyak 3 jaringan dengan total 300 Mbps
  - Internet Pengadilan Negeri Kendari untuk Gedung PHI dan Tipikor menggunakan Jaringan Astinet 10 Mbps dan Indihome 30 Mbps.

## C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Sarana dan Prasarana IT

1. Perangkat Lunak (Software)

(a) Website Pengadilan Negeri Kendari www.pn-kendari.go.id memberikan informasi tentang profil, laporan, berita, informasi perkara, pengumunan dan kegiatan pada Pengadilan Negeri Kendari.

(b) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / *Case Tracking System* (CTS) http://sipp.pn-kendari.go.id memberikan informasi tahapan perkara mulai dari pendaftran sampai pada putusan yang telah dimutakhirkan setiap harinya, baik untuk pihak internal Pengadilan maupun pihak eksternal Pengadilan.

(c) Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Badilum MA RI http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/#eis merupakan Aplikasi berbasis Web yang digunakan oleh Dirjen Badum MA RI dalam memonitoring dan mengevaluasi pelasanaan Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) terhadap Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.

(d) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ merupakan aplikasi berbasis web untuk mengupload perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK pada tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.

(e) Komdanas (Komunikasi Data Nasional) www.komdanas.mahkamahagung.go.id merupakan aplikasi yang digunakan untuk laporan keuangan, kepegawaian dan perencanaan.

(f) Sistem Informasi Kepegawaian https://sikep,mahkamahagung.go.id/ aplikasi yang digunakan untuk *update* data pegawai pada Pengadilan Negeri Kendari dan usul kenaikan pangkat otomatis (KPO).

(g) E-Kinerja https://kinerja.bkn.go.id/login merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja ASN berbasis web yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja.

(h) E-Court Mahkamah Agung RI https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (e-Filling), mendapatkan taksiran dan pembayaran panjar biaya perkara secara online (e-Payment), pemanggilan yang dilakukan dengan

saluran elektronik (e-Summons) dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Litigation).

(i) Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/ merupakan Integrasi berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

(j) Pelaporan Administarsi Peradilan Umum MA RI https://pelaporan.badilummahkamahagung.go.id merupakan Layanan Aplikasi Pelaporan Online bagi pengguna untuk melakukan pelaporan mandiri kepada Dirjen Badilum.

(k) Aplikasi Eraterang https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/ merupakan Layanan Permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon secara online.

(l) Aplikasi Survey Badilum Mahkamah Agung RI (SI SUPER) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ aplikasi yang digunakan untuk memonitoring dan menghitung Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK).

(m) Aplikasi Online Pendukung Lainnya

- www.sirup.lkpp.go.id
- www.djponline.pajak.go.id
- www.sse2.pajak.go.id
- www.spaint.kemenkeu.go.id
- www.simari.mahkamahagung.go.id
- www.sakti.kemenkeu.go.id
- www.satudja.kemenkeu.go.id
- https://esr.menpan.go.id/
- www.e-rekon-lk-djpbn.kemenkeu.go.id
- www.monev.kemenkeu.go.id
- www.bappenas.go.id
- https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAr/auth
- https://eiplans.mahkamahagung.go.id.
- https://sso.mahkamahagung.go.id.
- https://batara.mahkamahagung.go.id.
- https://asndigital.bkn.go.id/

(n) Aplikasi Online yang terdapat pada server Lokal PN Kendari

1. PTSP+
2. SIPP
3. MIS
4. LLK Simari
5. E-Court
6. E-Cepat
7. E-Brosur
8. E-Posbakum
9. E-Panjar
10. E-Learning
11. V-LARI
12. Antrian PTSP

(o) Aplikasi Online yang menggunakan server di luar PN Kendari :

1. Aplikasi *Userway* Disabilitas

(p) Aplikasi *Offline* Pendukung lainnya

1. GPP/Gaji
2. SAS/ Bendahara Pengeluaran
3. RKAKL
4. E-SPT
5. PIN PPSPM
6. SAIBA Satker 01 dan 03
7. SPT pph masa 22
8. SPT pph masa 23
9. SPT PPN 1107 PUT
10. Psedia
11. BMNKPB
12. Siman
13. SimakBMN

2. Perangkat Keras (*Hardware*)

| No | Uraian Aset | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | CCTV | 31 | - |
| 2 | LCD / Projector / Infocus | 4 | 2 Rusak Berat |
| 3 | Focusing Screen / Layar LCD Projector | 2 | Baik |
| 4 | Televisi | 9 | 1 Rusak Berat |
| 5 | UPS | 7 | 4 Rusak Ringan<br>1 Unit di Kantor PN Tipikor Baruga |
| 6 | Personal Computer | 47 | |
| 7 | Laptop | 8 | 2 Rusak Berat |
| 8 | Printer | 40 | - |
| 9 | Scanner | 2 | - |
| 10 | Server | 2 | - |
| 11 | Router (Mikrotik) | 2 | 1 Unit di Kantor PN Tipikor Baruga |
| 12 | Modem | 0 | - |
| 13 | Switch Hub | 11 | 3 Unit di Kantor PN Tipikor Baruga |

Tabel 4.14. Daftar Perangkat Keras (*Hardware*)

- **Implementasi *E-court* di Pengadilan Negeri Kendari**

*E-Court* atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut PERMA Nomor 3

Tahun 2018, pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-Court* hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-litigation* (persidangan secara elektronik).

Implementasi pelaksanaan *e-Court* pada Pengadilan Negeri Kendari tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran perkara Gugatan sebanyak 154 perkara dengan rincian sebagai berikut:
   - Perkara Gugatan terdaftar dan teregistrasi sebanyak 154 perkara
   - Perkara Gugatan tidak teregistrasi sebanyak 0 perkara
   - Perkara Gugatan di Cabut sebanyak 31 perkara
   - Perkara Gugatan sudah putus sebanyak 64 perkara
   - Perkara Gugatan dalam proses persidangan sebanyak 59 perkara
2. Perkara Gugatan Sederhana sebanyak 22 perkara dengan rincian sebagai berikut :
   - Perkara Gugatan Sederhana terdaftar dan teregistrasi sebanyak 22 perkara
   - Perkara Gugatan Sederhana tidak teregistrasi sebanyak 0 perkara
   - Perkara Gugatan Sederhana di cabut sebanyak 3 perkara
   - Perkara Gugatan Sederhana sudah putus sebanyak 18 perkara
   - Perkara Gugatan Sederhana dalam proses persidangan sebanyak 1 perkara
3. Perkara Perlawanan/Bantahan sebanyak 10 perkara dengan rincian sebagai berikut :
   - Perkara Bantahan terdaftar dan teregistrasi sebanyak 10 perkara
   - Perkara Bantahan tidak teregistrasi sebanyak 0 perkara
   - Perkara Bantahan di cabut sebanyak 1 perkara
   - Perkara Bantahan sudah putus sebanyak 5 perkara
   - Perkara Bantahan dalam proses persidangan sebanyak 4 perkara
4. Perkara Permohonan sebanyak 141 perkara dengan rincian sebagai berikut :
   - Perkara permohonan terdaftar dan teregistrasi 141 perkara
   - Perkara permohonan tidak teregistrasi 0 perkara

- Perkara permohonan di cabut 21 perkara
- Perkara permohonan sudah putus sebanyak 119 perkara
- Perkara permohonan dalam proses persidangan sebanyak 1 perkara

5. Perkara Permohonan Konsinyasi sebanyak 3 perkara dengan rincian sebagai berikut :
   - Perkara permohonan konsinyasi terdaftar dan teregistrasi 3 perkara
   - Perkara permohonan konsinyasi tidak teregistrasi 0 perkara
   - Perkara permohonan konsinyasi di cabut 0 perkara
   - Perkara permohonan konsinyasi sudah putus sebanyak 3 perkara
   - Perkara permohonan konsinyasi dalam proses persidangan sebanyak 0 perkara
6. Perkara PHI sebanyak 24 perkara dengan rincian sebagai berikut :
   - Perkara PHI terdaftar dan teregistrasi 24 perkara
   - Perkara PHI tidak teregistrasi 0 perkara
   - Perkara PHI di cabut 0 perkara
   - Perkara PHI sudah putus sebanyak 3 perkara
   - Perkara permohonan konsinyasi dalam proses persidangan sebanyak 21 perkara

- **Implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Kendari**

e-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi yang dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, antara lain: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin pembantaran, permohonan izin besuk secara elektronik, penetapan diversi, permohonan izin pinjam pakai barang bukti dan sebagainya. Aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi e-Berpadu diharapkan dapat mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. eBerpadu merupakan “embrio” perwujudan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik atau yang dikenal dengan e-Court Pidana, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Mahkamah Agung mengharapkan kebijakan ini akan menjadi perubahan proses menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Implementasi pelaksanaan *e-Berpadu* pada Pengadilan Negeri Kendari tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| Perkara | Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan | Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Elektronik menggunakan e-Berpadu | Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Konvensional |
|---|---|---|---|
| Pidana Biasa | 486 | 486 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 6 | 0 | 6 |
| Pidana Anak | 23 | 23 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 19 | 0 | 19 |
| Tipikor | 64 | 64 | 0 |
| **Jumlah** | **598** | **573** | **25** |

Tabel 4.15. Perkara Pidana & Tipikor yang Diajukan Melalui e-Berpadu

| PERKARA | Jumlah Layanan Perkara Pidana & Tipikor | Jumlah Layanan Pidana & Tipikor yang diajukan secara Elektronik menggunakan e-Berpadu | Jumlah Layanan Pidana & Tipikor yang diajukan secara Konvensional |
|---|---|---|---|
| Penyitaan | 1091 | 1091 | 0 |
| Penggeledahan | 228 | 228 | 0 |
| Pelimpahan Berkas | 637 | 637 | 0 |
| Perpanjangan Penahanan | 372 | 372 | 0 |
| Penetapan Diversi | 12 | 12 | 0 |
| Izin Besuk Tahan | 2929 | 2929 | 0 |
| Izin Keluar Tahanan | 4 | 0 | 4 |
| Permohonan Pembantaran | 0 | 0 | 0 |
| Perpanjangan Penahan Banding | 243 | 243 | 0 |
| Perpanjangan Penahan Ma | 48 | 48 | 0 |
| Pinjam Pakai | 12 | 0 | 12 |
| **Jumlah** | **5576** | **5560** | **16** |

Tabel 4.16. Layanan Perkara Pidana & Tipikor yang Diajukan Melalui e-Berpadu

- **Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kendari**

SIPP adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara pengadilan tingkat pertama. layanan informasi berbasis teknologi ini di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara Jadwal Sidang,

Statistik dan Riwayat Perkara. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik secara gratis/cuma-cuma dan realtime.

Pada hakikatnya Pengadilan Negeri Kendari telah mengimplementasikan pengisian SIPP sejak dari diterimanya berkas perkara sampai pada tahapan akhir yakni minutasi perkara. Proses penyelesaian perkara yang tercatat di dalam SIPP juga tercatat dalam register manual sehingga adanya kesamaan data yang terdapat dalam buku register dan aplikasi SIPP.

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Kendari telah menyelesaikan perkara sebanyak 890 perkara minutasi, Perkara Masuk Tahun 2025 sebanyak 952, Sisa Perkara tahun Lalu sebanyak 137 perkara dan Sisa tahun ini sebanyak 199 perkara dengan Rasio Penyelesaian Perkara sebesar 81,73%.

Berdasarkan klasifikasi dan beban perkara Pengadilan Negeri Kendari masuk dengan kategori jumlah perkara sebanyak 501 s/d 1000. Berikut capaian Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kendari Tahun 2025 beserta peringkat yang diperoleh :

| NO. | Periode | Kinerja | Kepatuhan | Kelengkapan | Kesesuaian | Total | Peringkat Nasional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Januari | 96.30% | 99.44% | 99.73% | 98.85% | 98.58% | 9 |
| 2. | Februari | 96.30% | 99.0% | 100.00% | 99.03% | 98.58% | 8 |
| 3. | Maret | 96.82% | 99.24% | 99.57% | 99.22% | 98.71% | 9 |
| 4. | April | 96.70% | 99.23% | 100.00% | 97.83% | 98.44% | 3 |
| 5. | Mei | 95.22% | 99.67% | 100.00% | 100.00% | 98.72% | 8 |
| 6. | Juni | 95.51% | 99.51% | 99.66% | 100.00% | 98.67% | 10 |
| 7. | Juli | 95.20% | 99.28% | 99.71% | 99.88% | 98.52% | 13 |
| 8. | Agustus | 95.27% | 99.14% | 99.83% | 99.71% | 98.49% | 11 |
| 9. | September | 94.30% | 99.14% | 100.00% | 99.87% | 98.33% | 13 |
| 10. | Oktober | 95.25% | 98.08% | 94.56% | 98.90% | 96.70% | 18 |
| 11. | November | 94.49% | 98.45% | 91.65% | 98.61% | 95.80% | 23 |
| 12. | Desember | 95.01 | 90.08 | 97.6 | 97.07 | 94.94 | 23 |

Tabel 4.17. Daftar Capaian SIPP PN Kendari Tahun 2025

# BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan publik senantiasi dievaluasi sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Evaluasi tersebut juga menghadirkan berbagai inovasi yang memudahkan pelasanaan tugas, baik untuk internal maupun eksternal.

## A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Kendari

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan merupakan tolak ukur kepuasan pada Pengadilan Negeri Kendari terhadap layanan Pengadilan Negeri Kendari sebagai peradilan di tingkat pertama. Pengukuran Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dilakukan dengan berpedoman pada survey kepuasan masyarakat berdasarkan PerMenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Kendari pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2025, secara online melalui link survei http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/099659.

Berikut variable/ruang lingkup pengukuan indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Negeri Kendari adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian Pelayanan (U1)

   Pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.
2. Prosedur Pelayanan (U2)

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan oleh pemberi layanan kepada penerima layanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Pelayanan (U3)

   Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaiakn seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
4. Biaya/Tarif (U4)

   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdsarkan kesepakatan penyelenggara dan masyarakat dan dituangkan dalm SK Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor

Kendari Kelas IA untuk perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana tidak dipungut biaya apapun.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)

   Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spresifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksanaan (U6)

   Kompetensi Pelayanan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

   Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Kualitas Sarana dan Prasarana (U8)

   Kualitas Sarana dan Prasarana adalah merupakan factor pendukung bagi penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U9)

   Penanganan pengaduan pengguna layanan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Untuk menghitung hasil survei sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 dengan menggunakan "Nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur. Nilai rata-rata tertimbang tersebut dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Total Nilai Rata-Rata per ruang lingkup}}{} \; X \; (1/9)$$

Nilai Mutu Pelayanan :

| No. | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 - 2,5996 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2,60 - 3,064 | 65,00 - 76,60 | C | Kurang Baik |
| 3 | 3,0644 - 3,532 | 76,61 - 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 - 4,00 | 88,31 - 100,00 | A | Sangat Baik |

Hasil survey Indeks Responden peradilan tingkat pertama terhadap pelayanan publik Pengadilan Negeri Kendari adalah sebagai berikut :

- Responden Survei adalah sebanyak 96 responden;
- Terdapat 3 nilai unsur terendah yaitu Biaya Tarif, Prosedur Pelayanan dan Kecepatan Waktu Pelayanan dengan rata-rata.
- Terdapat 3 nilai unsur tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, Perilaku petugas dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
- Indeks responden Pengadilan Negeri Kendari yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Kendari untuk Tahun 2025 diperoleh sebesar **98,64%** dan masuk pada **kategori A (Sangat Baik)** dengan nilai persepsi sebesar **3,95**.

## B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Kendari menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia. Pengadilan Negeri Kendari telah memiliki kebijakan Standar Pelayanan yang mendasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 kemudian dirubah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan diperbaharui dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Oleh karenanya untuk menyikapi hal tersebut, Pengadilan Negeri Kendari terlah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan yaitu dengan membuat Tim Pengawas PTSP dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 216/KPN.W23-U1/SK.OT1.2/I/2026 tanggal 06 Januari 2026 tentang Pengawas PTSP dan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendari 246/KPN.W23-U1/SK.OT1.2/I/2026 tentang Struktur dan Bentuk Tugas Pelayanan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tanggal 05 Januari 2026. Layanan PTSP yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kendari yaitu Layanan Umum, Pidana, Perdata, Hukum, Pojok E-Court, Informasi dan Pengaduan dan Layanan Ruang tamu Terbuka *Online*.

Sejak di berlakukannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Kendari terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Kendari mendapatkan penghargaan nominasi finalis dan harapan III pada Lomba PTSP kategori PN Kelas IA.




Gambar 5.1. Piagam Penghargaan Nominasi Finalis dan Harapan III Lomba PTSP

## C. Inovasi Pelayanan Publik

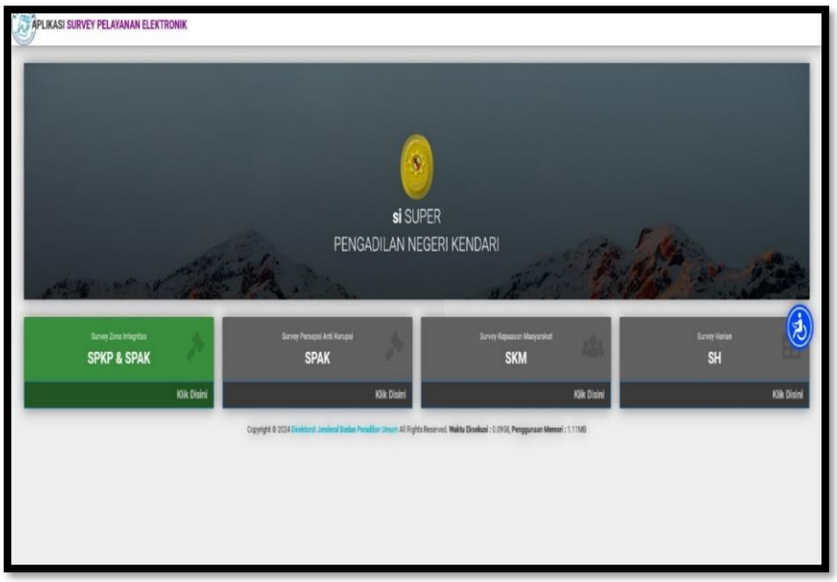
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem tatanegara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman, selaras dengan misi keempatnya yakni meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan dapat terlihat dengan hadirnya inovasi pelayanan publik berupa *E-litigasi* yang secara resmi diluncurkan pada 19 Agustus 2019, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019.

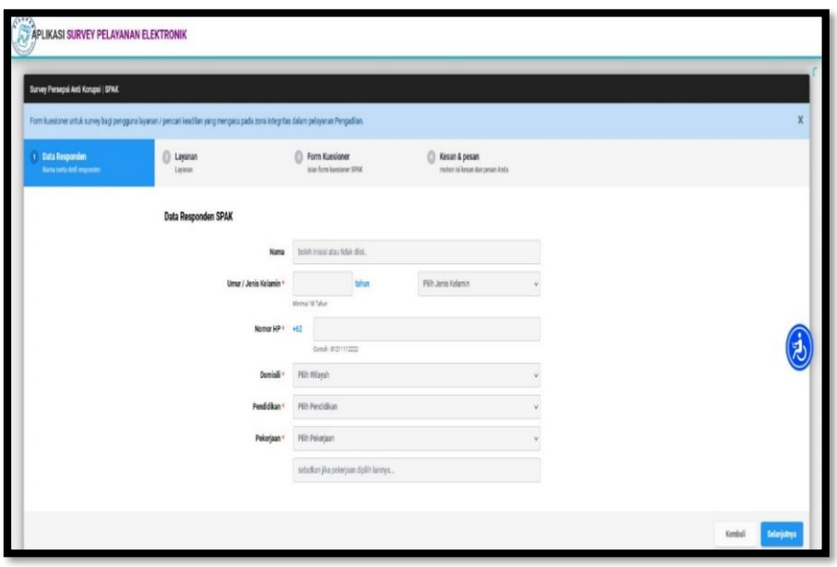
*E-Litigasi* merupakan kelanjutan dari *E-Court* sejak 2018 lalu untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara dengan Perma No.1/2019 merupakan perubahan dari Perma 3 /2018 mengenai *E-Court*. *E-Litigasi* merupakan inovasi lebih meluas dari sistem *E-Court*, yang mana *E-Court* melakukan administrasi pelayanan Publik pengadilan seperti pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi secara online serta Pemanggilan (Relas Panggilan) secara online. Sedangkan *E-Litigasi* dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan.

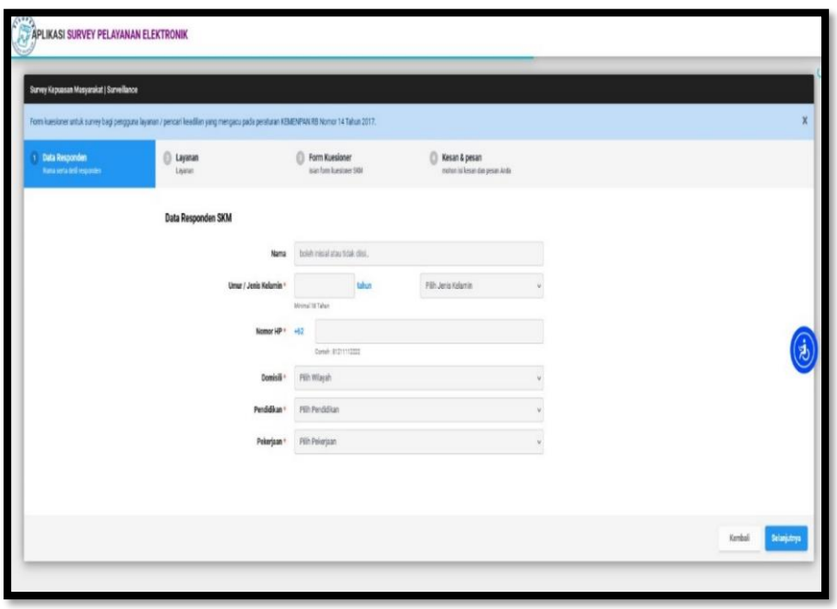
Dalam rangka mendukung program Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Negeri berusaha menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik guna memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Adapun inovasi-inovasi yang terus di kembangkan oleh Pengadilan Negeri Kendari adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Media Sosial berupa *Whatsapp Groups* dalam menunjang kinerja aparatur pengadilan untuk memudahkan dan meminimalisir atau mengurangi kontak fisik antara pihak kejaksaan dan panitera pengganti maupun majelis hakim ketika akan melakukan persidangan.
2. Adanya aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat yang di pasang pada ruang PTSP sehingga para pengguna layanan pengadilan dapat langsung memberi tanggapan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh petugas PTSP.

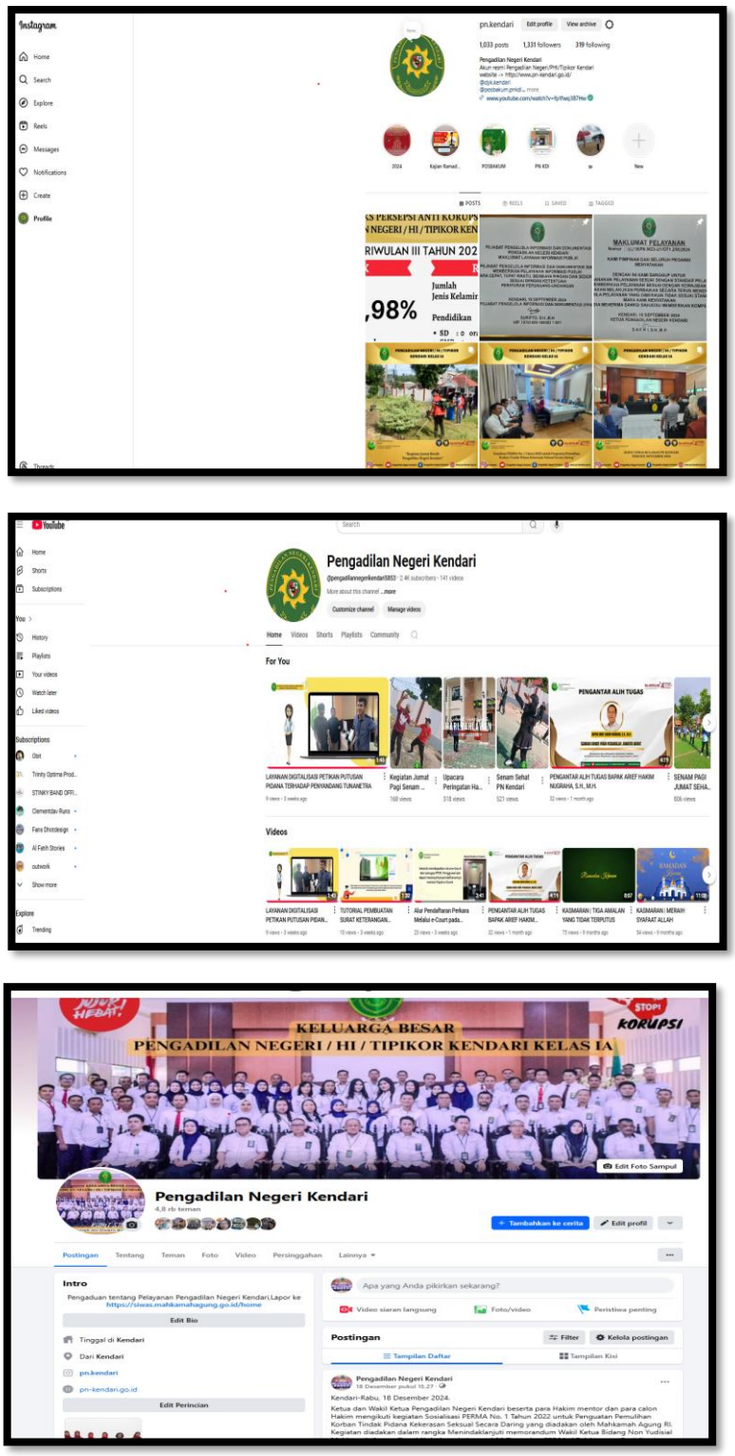


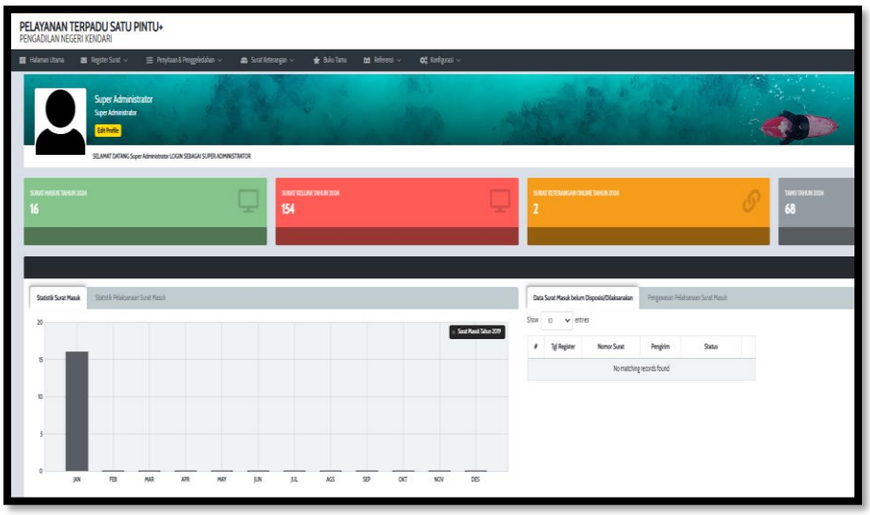

Gambar 5.2. Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat

3. Pemanfaatan Media Sosial Youtube, Facebook dan Instagram dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Kendari khususnya terkait kegiatan dan Informasi Pelanggaran Lalu Lintas atau Tilang dan Biaya Proses




Gambar 5.3. Youtube, Facebook dan Instagram

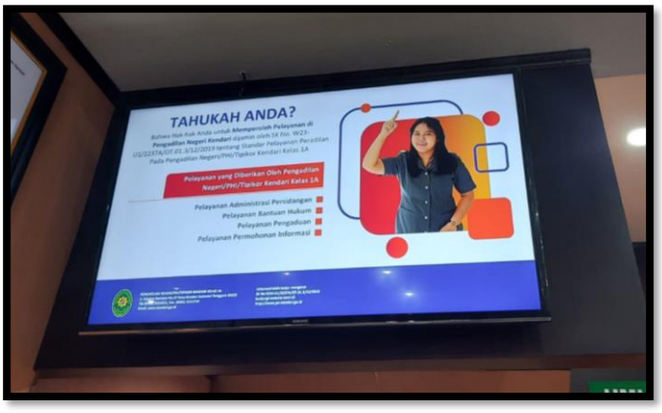
4. Penggunaan Aplikasi PTSP dalam menerima dan memberikan produk layanan seperti surat masuk dan keluar sertabuku tamu.




Gambar 5.4. Aplikasi PTSP

5. Tersedianya Layar Monitor dalam menampilkan informasi-informasi Profil Pengadilan, Indeks Kepuasan Masyarakat, Biaya Proses Perkara dan beberapa Animasi permohonan Surat Keterangan (Suket) melalui PTSP dan *E-Court*.



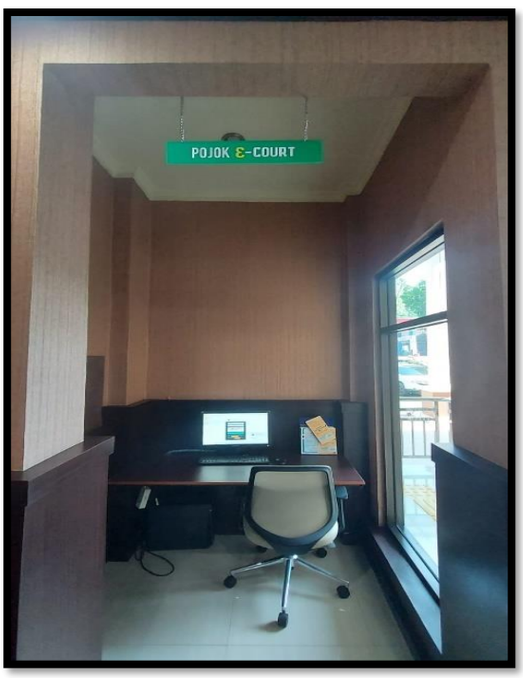

Gambar 5.5. Layar Monitor Informasi

6. Tersedianya LCD Monitor yang menampilkan jadwal persidangan yang terhubung langsung dengan SIPP.



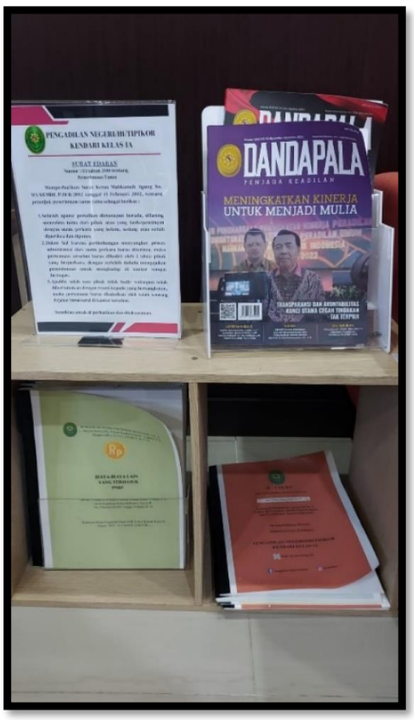
Gambar 5.6. LCD Monitor Terhubung dengan SIPP

7. Tersedianya Pojok *E-court* pengadaan Mahkamah Agung RI yang di letakkan ruang PTSP.




Gambar 5.7. Pojok *E-Court*

8. Adanya leaflet dan buku saku yang disediakan di Meja PTSP untuk memudahkan para pengguna layanan mengetahui tata cara melakukan pendaftaran perkara secara elektronik (*e -court*).



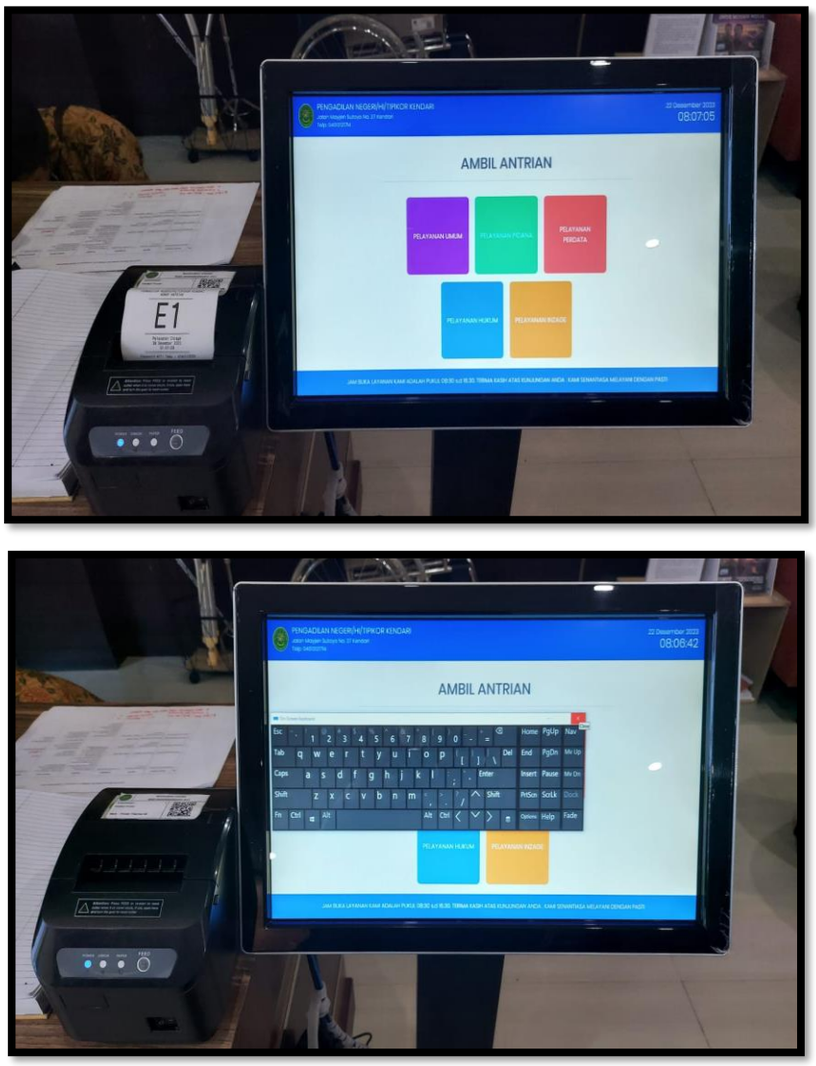

Gambar 5.8. Leaflet Informasi Layanan

9. Bekerjasama dengan BRI dalam menyediakan Mesin EDC untuk memudahkan para pengguna melakukan transaksi pembayaran panjar biaya perkara.




Gambar 5.9. EDC BRI

10. Tersedianya mesin antrian pelayanan PTSP untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada pengunjung agar lebih tertib dan rapi.




Gambar 5.10. Antrian Pelayanan PTSP

11. Tersedianya layanan bagi disabilitas (Buku Braille 6 jenis tentang layanan yang ada di Pengadilan)




Gambar 5.11. Layanan Buku Braille

12. Tersedianya Website bagi Pengguna Penyandang Disabilitas Tuna Netra dan Disleksia.







Gambar 5.12. Website Layanan Disabilitas

13. Pemberian kompensasi bagi pengguna layanan yang melebihi jam layanan



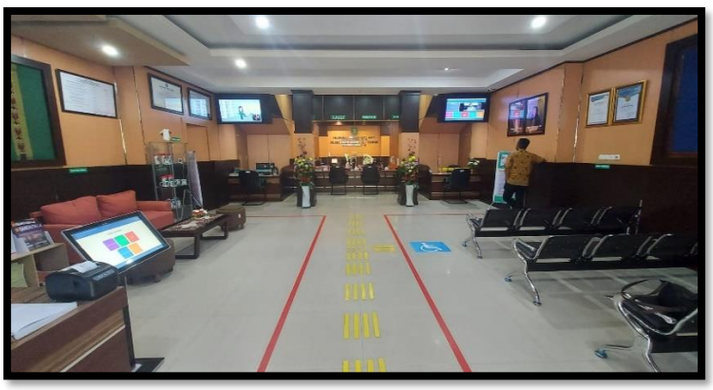

Gambar 5.13. Kompensasi Untuk Pengguna Layanan

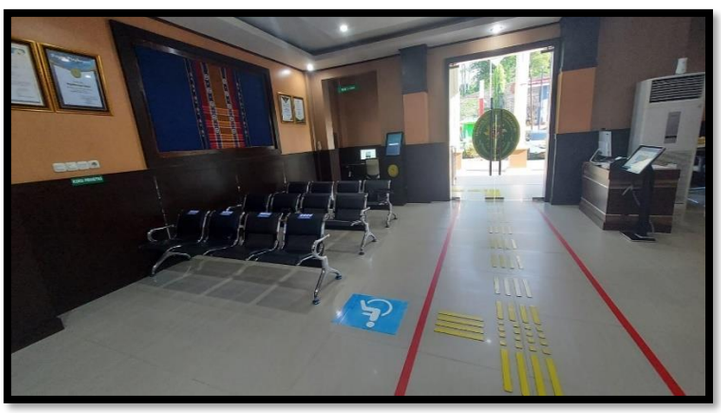
14. Sarana dan Prasarana Bagi Disabilitas











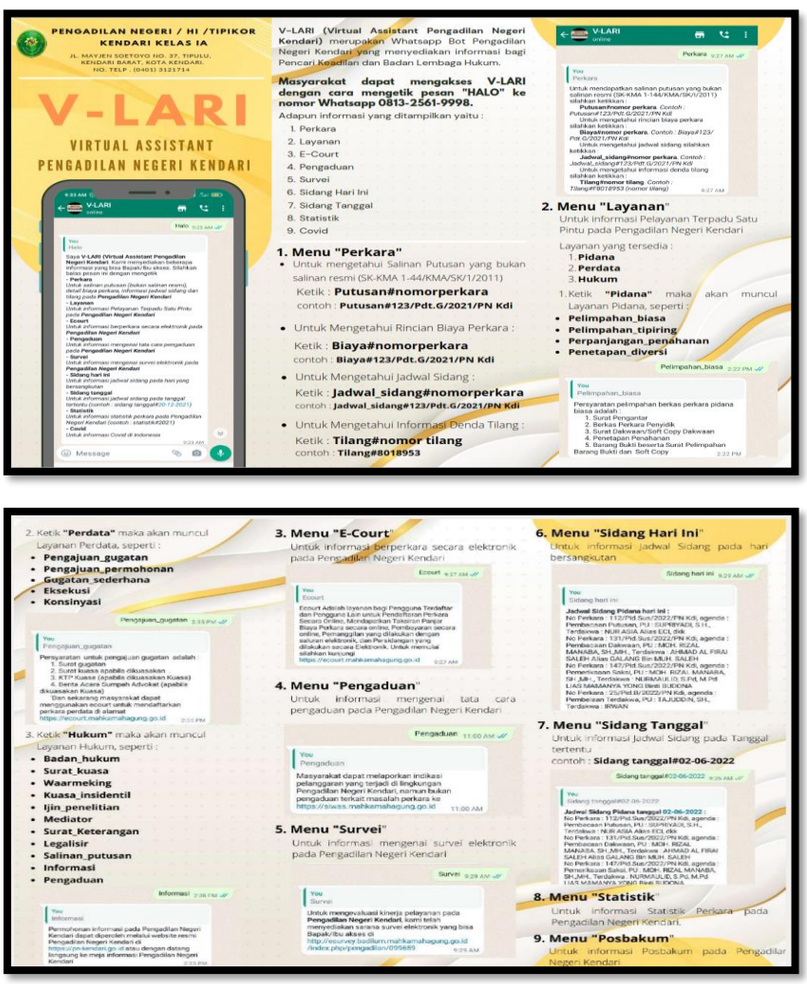
Gambar 5.14. Sarana dan Prasarna Disabilitas

15. Si Ulandari (Seputar Ulasan Pengadilan Negeri Kendari)




Gambar 5.15. Si Ulandari

16. Aplikasi V-LARI (Virtual Assistant Pengadilan Negeri Kendari) merupakan *Whatsapp Bot* Pengadilan Negeri Kendari yang menyediakan informasi bagi Pencari Keadilan dan Badan Lembaga Hukum.




Gambar 5.16. Aplikasi V-LARI

20. Arena Bermain Anak sebagai sarana edukasi dalam upaya peningkatan pelayanan Bagi Kelompok Rentan di Pengadilan Negeri Kendari.




Gambar 5.17. Arena Bermain PN Kendari

21. Ruang Perawatan Dalam Peningkatan Pelayanan Bagi Kelompok Rentan di Pengadilan Negeri Kendari.



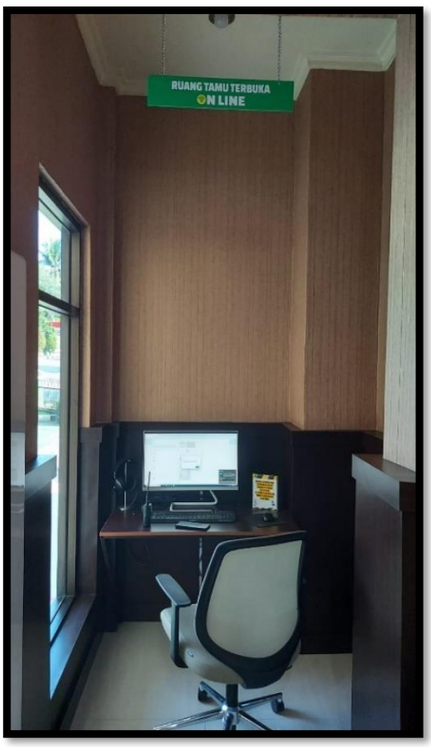
Gambar 5.18. Ruang Perawatan

24. Ruang Laktasi di Pengadilan Negeri Kendari dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan terhadap kaum rentan khususnya ibu menyusui di Pengadilan Negeri Kendari.



Gambar 5.19. Ruang Laktasi

25. Ruang Terbuka Tamu Online merupakan pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan yang ingin menemui pimpinan yang terhubung melalui *video call* melalui komputer yang sudah terhubung oleh sistem sehingga meminimalisir bertemu secara langsung dan segala percakapan akan terekam otomatis oleh sistem.




Gambar 5.20. Ruang Terbuka Tamu Online

# BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan penting untuk dilakukan sebagai salah satu bentuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tanggungjawab pelasanaan tugas.

## A. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin/Reguler, yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisian sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1989/KPN.W23-U1/SK.PW1/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, berikut daftarnya :

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Prayugotama, S.H.<br>NIP. 198602102009121004 | Hakim Pratama Utama | Kepaniteraan Pidana |
| 2 | Anuar Sakti Siregar,S.H., M.H.<br>NIP. - | Hakim Ad Hoc Tipikor | |
| 3 | Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.<br>NIP. 19790708 200212 1 004 | Hakim Madya Muda | Kepaniteraan Perdata |
| 4 | Sulasmy Tri Juniarty, S.H.<br>NIP. 198106142007042001 | Hakim Madya Pratama | |
| 5 | Mahyudin, S.H.<br>NIP. 198203152008051001 | Hakim Pratama Utama | Kepaniteraan Hukum |
| 6 | Ardian Hamdani, S.H., M.H.<br>NIP. 1977012502202302010 | Hakim Ad Hoc Tipikor | |
| 7 | Wahyu Bintoro, S.H.<br>NIP. 19760823 200212 1 002 | Hakim Madya Pratama | Kepaniteraan Tipikor |
| 8 | Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H.<br>NIP. 1981012302202201054 | Hakim Ad Hoc Tipikor | |
| 9 | Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H.<br>NIP. 19760126 200112 1 001 | Hakim Madya Muda | Kepaniteraan Hubungan Industrial |
| 10 | Daryono, S.H., M.H.<br>NIP. - | Hakim Ad Hoc PHI | |
| 11 | Wa Ode Sangia, S.H.<br>NIP. 198007232008052001 | Hakim Pratama Utama | Sub Bagian Umum Dan Keuangan |
| 12 | Muhammad Nurjalil, S.H., M.H.<br>NIP. - | Hakim Ad Hoc Tipikor | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Drs. Parsungkunan, S.H<br>NIP. - | Hakim Ad Hoc Tipikor | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Tata Laksana |
| 15 | Mahardian, S.H., M.H.<br>NIP. - | Hakim Ad Hoc PHI | Sub Bagian Perencanaan, Ti Dan Pelaporan |
| 16 | Indra Gunawan, S.H.<br>NIP. - | Hakim Ad Hoc PHI | |

Tabel 6.1. Data Hakim Pengawas Bidang

Pengawasan Melekat yang telah diterapkan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Kendari antara lain :

a. Pelaksanaan Rapat Pengawasan bidang pada setiap bagian yang dilakukan setiap minggu oleh Hakim Pengawas Bidang dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan bidang mendapatkan informasi permasalahan yang dihadapi, pemecahan masalah serta pelaksanaan tugas yang telah selesai dilaksanakan yang dituangkan dalam bentuk laporan pengawasan bidang dan dipertanggungjawabkan setiap bulannya.
b. Pelaksanaan Rapat Berjenjang setiap bulan yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian untuk mengevaluasi hasil temuan yang belum ditindak lanjuti pada saat Rapat Pengawasan Bidang.
c. Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dilakukan bersama Hakim Pengawas Bidang untuk membahas temuan beserta tindak lanjut dari Hasil Temuan Pengawasan maupun permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bidang untuk mendapatkan solusi terbaik.
c. Pelaksanaan Rapat Dinas adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan yang rutin dilaksanakan di minggu pertama pada bulan berjalan untuk membahas seluruh permasalahan yang telah dilaporkan oleh pengawas bidang serta tindak lanjut yang telah dilakukan.
d. Pelaksanaan Rapat Baperjakat, yang diperuntukan bagi pegawai telah memenuhi persyaratan untuk dipromosi maupun pegawai yang bermohon untuk mutasi.
e. Pelaksanaan rapat yang bersifat insidentil, dilaksanakan tanpa direncanakan oleh pimpinan apabila ada hal-hal yang harus diselesaikan dalam waktu singkat.

f. Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu.

g. Pelaksanaan Rapat Penegakan disiplin oleh Tim Penegak Kedispilinan dengan membahas dan mengevaluasi pegawai yang tidak mematuhi aturan kedisiplinan di Pengadilan Negeri Kendari.

2. Pengawasan Rutin/Reguler pada Pengadilan Negeri Kendari antara lain :

a. Pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

b. Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Juli dan Desember 2025 dan telah ditindaklanjuti.

c. Pada Tahun 2025 Tim Assesmen AMPUH Ditjen Badilum telah melakukan pengawasan sebanyak satu kali pada Bulan September 2025 dan telah ditindaklanjuti.

**B. Evaluasi**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya diperlukan evaluasi sebagai tindaklanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan. Evaluasi kinerja sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi karena dengan evaluasi kinerja dapat meningkatkan perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas serta terukur pada masing-masing unit kerja. Berikut hasil evaluasi Pengadilan Negeri Kendari selama Tahun 2025 :

1. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta tindaklanjut terhadap hasil pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan reguler oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dam Dirjen Badilum.
2. Dalam pelaksanaan persidangan baik perkara pidana maupun perdata dilakukan secara langsung.

3. Penyelesaian perkara dengan Nilai Evaluasi Implementasi SIPP tertinggi dengan ranking 3 pada Bulan Maret Tahun 2025 untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IA dengan jumlah perkara sebanyak 501 s/d 1000.
4. Pengadilan Negeri Kendari juga menerapkan sistem pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Hakim, karyawan/i dan tenaga honorer yang memiliki kinerja terbaik setiap triwulan dan diumumkan dalam rapat dinas bulanan, sedangkan pemberian *punishment* terhadap pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja dengan memberikan surat teguran atau peringatan.
5. Terhadap unsur layanan terendah atas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Kendari yang terdiri dari 3 unsur (1) Kesesuaian Biaya/Tarif, (2) Kemudahan Prosedur Pelayanan dan (3) Kecepatan Waktu Pelayanan. Pengadilan Negeri Kendari telah menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi dengan Tim Supervisi dan petugas PTSP untuk memberikan pelayanan optimal.

# BAB VII PENUTUP

## A. Kesimpulan

Selama tahun 2025 Pengadilan Negeri Kendari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada, berikut capaian-capaian yang telah dilakukan yaitu :

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik.
- Rasio tingkat penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Kendari mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 87,70% naik menjadi 81,73%.
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Negeri Kendari berjumlah 81 orang, yang terdiri dari 9 Orang Hakim Karir, 8 Orang Hakim Ad Hoc, 25 Orang tenaga teknis, 24 Orang tenaga Non Teknis dan 15 Orang PPPK.
- Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Para Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Kendari telah mengikuti Diklat, Pelatihan maupun Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI melalui *daring*, *nondaring* maupun *blended learning.*
- Pengelolaan keuangan dapat dikatakan bahwa output dari DIPA 01 dan 03 sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran DIPA 01 sebesar 98,64 % dan DIPA 03 sebesar 98,04% serta diikuti penyerapan PNBP sebesar 100%.
- Pada tahun 2025 pengelolaan sarana dan prasarana gedung serta fasilitas kantor lainnya telah diupayakan sehingga tercipta tata kelola sarana prasarana yang baik dan nyaman serta dilengkapi dengan beberapa fasilitas pelayanan baru seperti ruang panmud PHI dan Tipikor.
- Pengadilan Negeri Kendari telah aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun Badilum secara *daring* atau *online* (*zoom*).
- Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan beberapa regulasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan dalam menindaklanjuti Peraturan-peraturan, SEMA, Perma dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI selama tahun 2024.

- Pengadilan Negeri Kendari telah menerapkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan pengadilan melalui satu pintu yang didukung dengan berbagai inovasi aplikasi pelayanan yang memudahkan untuk memberikan pelayanan.
- Pengadilan Negeri Kendari telah menerapkan aplikasi E-Court dengan fitur *e-filling* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan pihak secara elektronik), *e-litigasi* (persidangan secara elektronik).
- Pengadilan Negeri Kendari telah menerapkan aplikasi E-Berpadu dengan memanfaatkan layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan baik internal maupun Pengawasan Rutin oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun dari Badan Penagwas Mahkamah Agung telah dilaksanakan dengan baik diikuti dengan hasil temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan baik dalam bentuk laporan.

Selain capaian-capaian yang disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Kendari juga masih memiliki beberapa kendala yang menjadi perhatian bersama kedepannya yakni kurangnya bimtek atau pelatihan sesuai jobdesk masing-masing khususnya di bagian kesekretariatan sehingga SDM yang ada saat ini beberapa tidak menguasai tupoksinya. Begitu pula kesiapan sarana dan prasarana perkantoran yang perlu ditingkatkan karena fasilitas yang tersedia sekarang ini kurang memadai khususnya ketersediaan ruangan dikarenakan anggota PPPK sudah mulai menjalankan tupoksinya di ruangan namun ketersediaan kursi dan meja serta ruangan yang saat ini tidak memadai serta ketersediaaan ruang arsip yang sudah tidak mencukupi. Fasilitas Rumah Dinas Hakim yang sangat tidak layak bagi Pejabat Tinggi Negara karena keterbatasannya anggaran yang diberikan pada Pengadilan Negeri Kendari.

## B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Kendari maka perlu dilakukan antara lain:

1. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan/renovasi gedung kantor dan rumah dinas serta fasilitas perkantoran lainnya.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Diklat/Pelatihan sesuai dengan formasi masing-masing.
3. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

# LAMPIRAN

**KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI**

NOMOR 296/KPN.W23-U1/SK.OT1.6/I/2026

**T E N T A N G**
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI,**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyus unan Laporan Tahunan pada Pengadilan Negeri Kendari Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2025;

c. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I;
13. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI .**

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 107/KPN.W23-U1/SK.OT1.2/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Kendari.

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2025.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2025 mempunyai tugas :

1. Menginventarisir dan menyusun Laporan Tahunan Tahun 2025 dari sub bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam lingkungan unit kerja Pengadilan Negeri Kendari;
2. Menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Kendari sesuai *outline* Laporan Tahunan sehingga menjadi laporan kegiatan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran;
3. Laporan dibuat dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sesuai jadwal yang ditetapkan.

KETIGA : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2025 ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 05 Januari 2026

**KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI,**

**RUSTAM**

**LAMPIRAN I**
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI**
NOMOR : 296/KPN.W23-U1/SK.OT1.6/I/2026
TANGGAL : 05 Januari 2026

## TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI

| NO | NAMA/PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN | DITUNJUK SEBAGAI |
|---|---|---|---|
| 1. | RUSTAM, S.H., M.H.<br>NIP. 197010111999031004 | Ketua Pengadilan Negeri Kendari | Pembina I |
| 2. | HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H.<br>NIP. 197412311993032001 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari | Pembina II |
| 3. | Drs. PARSUNGKUNAN S.H., M.H.<br>NIP.- | Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | Koordinator Data |
| 4. | ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.<br>NIP.- | | |
| 5. | JAMES MOCHTAR MASILI, S.H., M.H.<br>NIP. 197206131993031004 | Panitera | Penanggung Jawab Kepaniteraan |
| 6. | ASRUL, S.E., M.M.<br>NIP. 197108242005021001 | Sekretaris | Penanggung Jawab Kesektariatan |
| 7. | BENY KRISTIAN LABAN, S.Kom., M.M.<br>NIP. 19800228200904104 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | Ketua |
| 8. | ASRI NURUL UTAMI, S.A.P.<br>NIP. 199501092022032004 | Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | Sekretaris |
| 9. | NI MADE SUTRINI, S.H.<br>NIP. 198002142025212017 | Penata Layanan Operasional | |
| 10. | DJAYADI, S.H.<br>NIP. 196810151989031004 | Panitera Muda Pidana | Anggota |
| 11. | ZULFIKAR, S.H.<br>NIP. 198404142011011009 | Panitera Muda Perdata | |
| 12. | NURMIATY, S.H.<br>NIP. 197809212002122002 | Panitera Muda Hukum | |
| 13. | MUJIRUN, S.H., M.H.<br>NIP. 197904162002121002 | Panitera Muda Khusus Tipikor | |
| 14. | DARWIS, S.H.<br>NIP. 198301032009121006 | Panitera Muda Khusus PHI | |
| 15. | WA ODE NUR IQAMAH, S.T.<br>NIP. 198412182009042009 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Organisasi dan Tata Laksana | |
| 16. | MISRAWATI MALENDA, S.E., M.A.P.<br>NIP.198503162009042004 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 05 Januari 2026

**KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI,**

**RUSTAM**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**
**PENGADILAN NEGERI KENDARI**
Jalan Mayjen Sutoyo No.37 Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara Kode Pos 93122, www.pn-kendari.go.id, peen.kendari@yahoo.com

# U N D A N G A N

Kendari, 12 Desember 2025

Hal : Rapat Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan (LAPTAH)

K e p a d a Yth.

1. Wakil Ketua
2. Hawasbid Subag PTIP
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Para Panitera Muda
6. Para Kasubag
7. Staf PTIP

di Tempat

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan (LAPTAH) tahun 2025 Pengadilan Negeri Kendari, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin/ 15 Desember 2025;

Waktu : 10.00 sampai selesai;

Tempat : Ruang *Command Center*;

Demikian undangan ini kami sampaikan dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Kendari

RUSTAM

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**
**PENGADILAN NEGERI KENDARI**
Jalan Mayjen Sutoyo No.37 Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara Kode Pos 93122, www.pn-kendari.go.id, peen.kendari@yahoo.com

# NOTULA
# RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LAPTAH) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI KENDARI
## HARI : SENIN, 15 DESEMBER 2025

Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Ketua MAhkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Hari : Senin
Tanggal : 15 Desember 2025
Pukul : 10.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Ruang *Command Center*
Acara : Rapat Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025
Peserta Rapat :
1. Ketua PN Kendari
2. Wakil Ketua PN Kendari
3. Hawasbid Subag PTIP
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Para Panitera Muda
7. Para Kasubag
8. Staf PTIP

Jalannya rapat :

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**
**PENGADILAN NEGERI KENDARI**
Jalan Mayjen Sutoyo No.37 Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara Kode Pos 93122, www.pn-kendari.go.id, pncn.kendari@yahoo.com

Ketua Pengadilan Negeri Kendari

- **Maksud dan Tujuan :**

- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efesien dan efektif;
- Untuk memantau keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Program Kegiatan Pengadilan Negeri Kendari.

- **Agenda Kegiatan :**

Menyusun Dokumen Laporan Tahunan sesuai dengan *outline* yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI terdiri atas ;

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Penyelesaian Perkara Putus tepat Waktu, Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK, berhasil diselesaikan melalui RJ, Mediasi, Diversi, e-court dan e-Berpadu.
3. Akreditasi Penjaminan Mutu (Posbakum).
4. Sumber Daya Manusia Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/Pendidikan seperti mutasi, promosi, pensiun dan Diklat.
5. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, Teknologi Informasi.
6. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan, PTSP dan Inovasi Pelayanan Publik.
7. Pengawasan Internal dan Evaluasi.

- **Hasil Kegiatan :**

- Seluruh per sub bagian masing-masing menyiapkan bahan/data yang diperlukan terkait penyusunan dokumen Laptah.
- *Update* kembali data-data terbaru terkait dokumen yang diminta.
- Koordinasikan dengan per bagian bidang jika ada data yang belum lengkap.
- Menyelesaikan laporan tahunan tahun 2025 sesuai *outline*

Laptah sehingga menjadi laporan kegiatan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran.

- Laporan dibuat dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Sultra diusahakan paling lambat sebelum *deadline* dari Pengadilan Tinggi Sultrta dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Sultra.

Demikian Notulen ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan dan Notulis.

| Notulis | Ketua Pengadilan Negeri Kendari |
|---|---|
| ASRI NURUL UTAMI | RUSTAM |

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**
**PENGADILAN NEGERI KENDARI**
Jalan Mayjen Sutoyo No.37 Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara Kode Pos 93122, www.pn-kendari.go.id, peen.kendari@yahoo.com

# DOKUMENTASI
# RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI KENDARI
## HARI : SENIN, 15 DESEMBER 2026






MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PENGADILAN NEGERI KENDARI
Jalan Mayjen Sutoyo No.37 Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara Kode Pos 93122, www.pn-kendari.go.id, peen.kendari@yahoo.com

# DAFTAR HADIR
## RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LAPTAH) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI KENDARI

**Tanggal : 15 Desember 2025**

**Tempat : Ruang Media Center**

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Rostan | KPN | 1. |
| 2. | HASRIWATI Yulius | WKPN | 2. |
| 3. | M. Masrul | Panitera | 3. |
| 4. | Mahardian | Adhoc PHI | 4. |
| 5. | Darjono | HA-PM, | 5. |
| 6. | Ardion Mondroni | HAT | 6. |
| 7. | A. Nur Hasmah | Hakim | 7. |
| 8. | Zaccary | | 8. |

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**
**PENGADILAN NEGERI KENDARI**
Jalan Mayjen Sutoyo No.37 Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara Kode Pos 93122, www.pn-kendari.go.id, peen.kendari@yahoo.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | INDRA GUNAWAN | HA PHI | 9. |
| 10. | Nurmicets | Panmud Hukum | 10. |
| 11. | Darwis | Panmud PHI | 11. |
| 12. | Zulfikar | Panmud Perdata | 12. |
| 13. | Sulasmy T. S | Hk Kim | 13. |
| 14. | Djayadi | panmud pidana | 14. |
| 15. | ASRUL | Sekretaris | 15. |
| 16. | Bam KL | Ka. PTIP | 16. |
| 17. | WN. LOGUMAH | Kasubag Keu | 17. |

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**
**PENGADILAN NEGERI KENDARI**
Jalan Mayjen Sutoyo No.37 Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara Kode Pos 93122, www.pn-kendari.go.id, peen.kendari@yahoo.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18. | Wacode Saingka | Hakim | 18. |
| 19. | Nimalisan, Bsir | Pranak keuangan APBN | 19. |
| 20. | MUJIRIN | Pamud Bapeda | 20. |
| 21. | Misrawati. | K. Umum keuangan | 21. |
| 22. | ASRI N.U | STAF PTIP | 22. |
| 23. | MADE SUTRINI | PPPK PTIP | 23. |
| 24. | | | 24. |
| 25. | | | 25. |
| 26. | | | 26. |